

SKRIPSI

**PENGARUH AKUNTABILITAS DAN PARTISIPASI MASYARAKAT
TERHADAP EFEKTIVITAS ANGGARAN DESA PADA DESA
MIRRING KECAMATAN BINUANG KABUPATEN
POLEWALI MANDAR**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025

SKRIPSI

PENGARUH AKUNTABILITAS DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP EFEKTIVITAS ANGGARAN DESA PADA DESA MIRRING KECAMATAN BINUANG KABUPATEN POLEWALI MANDAR



OLEH:

ARMA

NIM: 2120203862202015

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)

pada Program Studi Akuntansi syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi	: Pengaruh Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Efektivitas Anggaran Desa Pada Desa Mirring Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar
Nama	: Arma
NIM	: 2120203862202015
Program Studi	: Akuntansi Syariah
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Dasar Penetapan Pembimbing	: SK Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Nomor : B-4138/In.39/FEBI.04/PP.00.9/08/2024

Disetujui Oleh:

: Dr. Abdul Hamid, S.E., M.M.
: 197209292008011012



Mengetahui:

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.



PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Pengaruh Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat terhadap Efektivitas Anggaran Desa pada Desa Mirring Kecamatan Binuang kabupaten Polewali Mandar

Nama Mahasiswa : Arma
NIM : 2120203862202015
Program Studi : Akuntansi Syariah
Dasar Penetapan : SK Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Nomor : B-4138/In.39/FEBI.04/PP.00.9/08/2024
Tanggal Kelulusan : 24 Juli 2025

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dr. Abdul Hamid, S.E., M.M.

: (Ketua)

(.....)

Darwis, S.E., M.Si.

: (Anggota)

(.....)

Ira Sahara, S.E., M.Ak.

: (Anggota)

(.....)

Mengetahui:

Dekan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



PROF DR. MUZDAHYAH MUHAMMADUN, M.A.

NIP 19710208 2001 12 2 002

KATA PENGANTAR

الرَّحِيمُ الرَّحْمَنُ اللَّهُ بِسْمِ

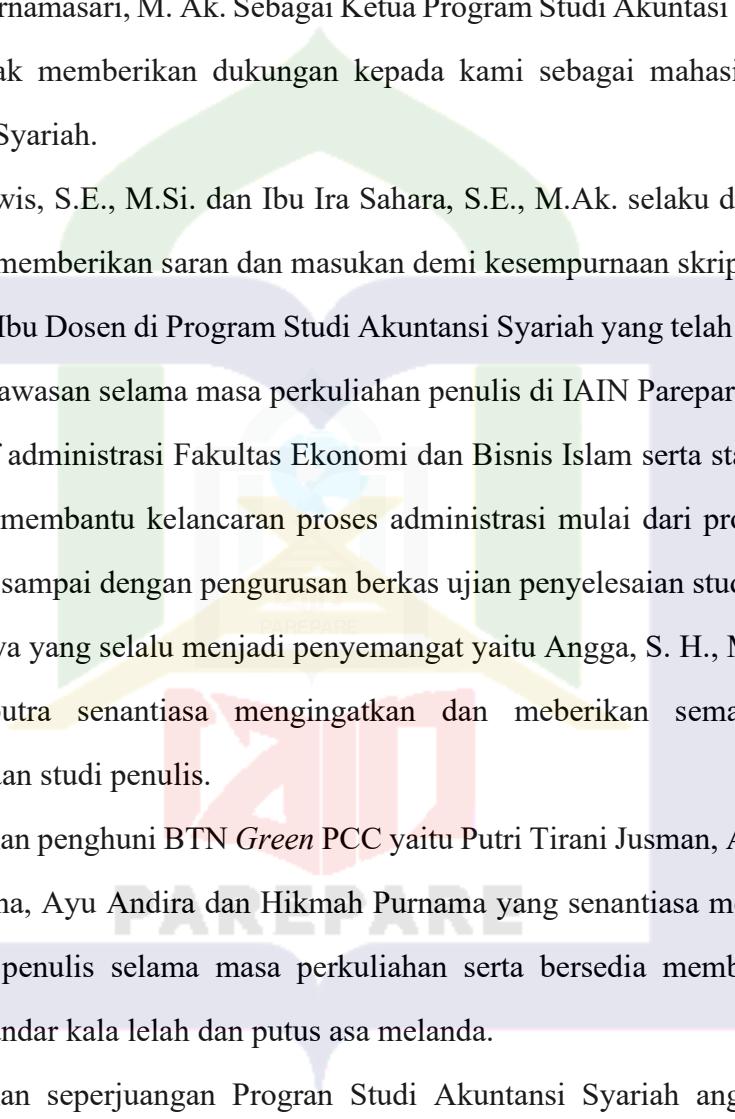
Puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT. atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Efektivitas Anggaran Desa Pada Desa Mirring Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana stara satu (S1) pada program studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda Suriyani dan Ayahanda M. Saleh tercinta dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. Abdul Hamid, S.E., M.M. selaku dosen pembimbing utama yang telah dengan sabar memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi selama proses penyusunan skripsi ini dan atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapan banyak terima kasih.

Dalam proses penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa tidak akan dapat menyelesaikan tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.

- 
2. Ibu Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana yang positif bagi seluruh mahasiswa.
 3. Ibu Rini Purnamasari, M. Ak. Sebagai Ketua Program Studi Akuntansi Syariah yang telah banyak memberikan dukungan kepada kami sebagai mahasiswa jurusan Akuntansi Syariah.
 4. Bapak Darwis, S.E., M.Si. dan Ibu Ira Sahara, S.E., M.Ak. selaku dosen penguji yang telah memberikan saran dan masukan demi kesempurnaan skripsi ini.
 5. Bapak dan Ibu Dosen di Program Studi Akuntansi Syariah yang telah memberikan ilmu dan wawasan selama masa perkuliahan penulis di IAIN Parepare.
 6. Jajaran staf administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam serta staf Akademik yang telah membantu kelancaran proses administrasi mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai dengan pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
 7. Saudara saya yang selalu menjadi penyemangat yaitu Angga, S. H., M. Arfan dan Andri Saputra senantiasa mengingatkan dan memberikan semangat dalam penyelesaian studi penulis.
 8. Teman-teman penghuni BTN *Green* PCC yaitu Putri Tirani Jusman, Aulia Hamru, Wahyu Anna, Ayu Andira dan Hikmah Purnama yang senantiasa membantu dan menemani penulis selama masa perkuliahan serta bersedia memberikan bahu untuk bersandar kala lelah dan putus asa melanda.
 9. Teman-teman seperjuangan Program Studi Akuntansi Syariah angkatan 2021, teman-teman Organisasi, dan teman-teman KKN posko 21 yang selalu senantiasa memberikan dukungan.

10. Arma kepada diri saya sendiri. Terima kasih sudah berjuang sampai saat ini dan tidak mudah menyerah, suatu kebanggan bagi diri sendiri bisa sampai ke tahap ini. Bukan hal yang mudah, perjalanan ini begitu banyak mengusar keringat dan air mata, tapi nyatanya saya bisa sampai ke tahap ini. Terima kasih untuk diri sendiri.
11. Terakhir terima kasih untuk semua yang tidak dapat kusebut satu persatu yang kerab membantu dan menemani selama proses pembuatan penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi isi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan karya ini dimasa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

Parepare, 23 Juni 2025
20 Dzulhijjah 1446 H
Penulis



21202038622020155

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Arma
NIM : 2120203862202015
Tempat/Tanggal Lahir : Tappina, 09 November 2003
Program Studi : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Pengaruh Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Efektivitas Anggaran Desa Pada Desa Mirring Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plgiat atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukim.

Parepare, 23 Juni 2025

Penulis



2120203862202015

ABSTRAK

Arma, *Pengaruh Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Efektivitas Anggaran Desa Pada Desa Mirring Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar* (Dibimbing oleh Abdul Hamid).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh akuntabilitas dan partisipasi masyarakat terhadap efektivitas anggaran desa pada desa mirring kecamatan binuang kabupaten polewali mandar selama periode 2024. Permasalahan yang terjadi di lapangan antara lain kurangnya transparansi dalam pengelolaan anggaran dan minimnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan anggaran, yang berdampak pada rendahnya efektivitas anggaran dana desa.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui kuesioner kepada 35 responden yang terdiri dari aparatur desa dan masyarakat. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan SPSS versi 26.

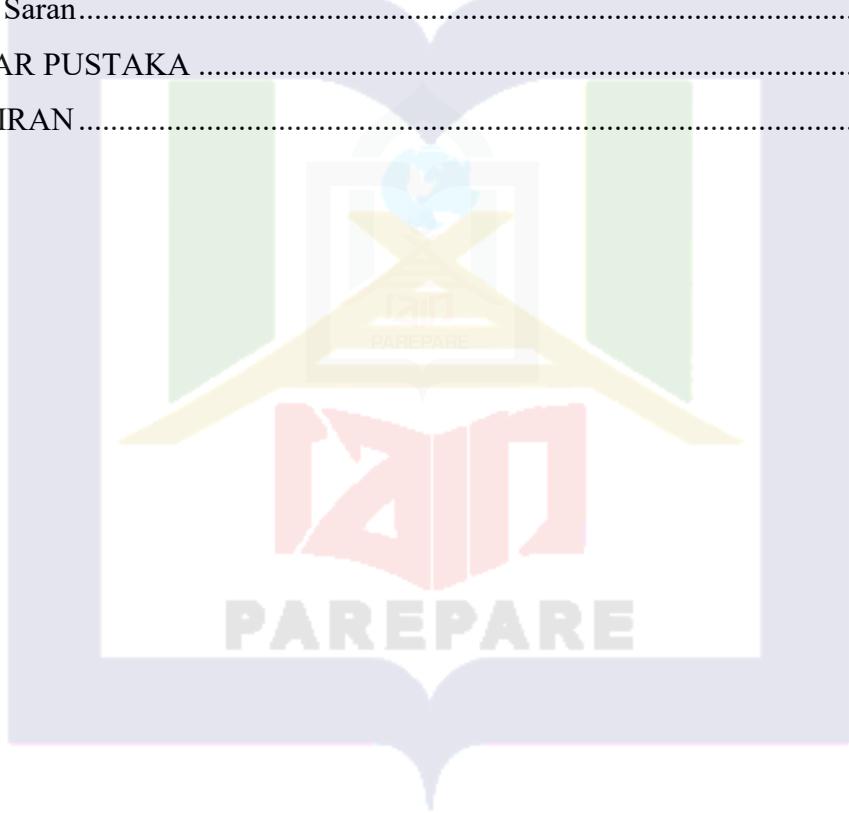
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap efektivitas anggaran desa, partisipasi masyarakat tidak berpengaruh secara signifikan terhadap efektivitas anggaran desa, dan secara simultan akuntabilitas dan partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap efektivitas anggaran desa. Artinya semakin tinggi tingkat akuntabilitas dan partisipasi masyarakat, maka semakin tinggi pula efektivitas anggaran desa.

Kata Kunci: *Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, Efektivitas Anggaran desa, Pengelolaan Dana desa, Pemerintah Desa.*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PERNYATAAN KEASLIHAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	10
B. Tinjauan Teori	15
C. Kerangka Pikir.....	31
D. Hipotesis.....	32
BAB III METODE PENELITIAN.....	36
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	36
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	36
C. Populasi dan Sampel	36
D. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	38
E. Definisi Operasional Variabel.....	39

F. Instrumen Penelitian.....	42
G. Teknik Analisis Data.....	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
A. Deskripsi Hasil Penelitian	48
B. Pengujian Persyaratan Analisis Data.....	56
C. Pengujian Hipotesis.....	64
D. Pembahasan Hasil Penelitian.....	67
BAB V PENUTUP.....	79
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN	87



DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
Tabel 3.1	Operasional Variabel	39
Tabel 3.2	Skala Likert	42
Tabel 4.1	Karakteristik Responden Berdasarkan Umur	48
Tabel 4.2	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	49
Tabel 4.3	Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan	49
Tabel 4.4	Distribusi Jawaban Responden Variabel Akuntabilitas	50
Tabel 4.5	Distribusi Jawaban Responden Variabel Partisipasi Masyarakat	52
Tabel 4.6	Distribusi Jawaban Responden Variabel Efektivitas Anggaran Desa	53
Tabel 4.7	Hasil Statistik Deskriptif	55
Tabel 4.8	Uji Validitas Variabel Independen	57
Tabel 4.9	Uji Validitas Variabel Dependen	57
Tabel 4.10	Uji Reabilitas Variabel X	58
Tabel 4.11	Uji Reabilitas Variabel Y	59
Tabel 4.12	Uji Normalitas	60
Tabel 4.13	Uji Multikolinaritas	61
Tabel 4.14	Uji Regresi Linear Berganda	63
Tabel 4.15	Uji Statistik Parsial (Uji t)	64
Tabel 4.16	Uji Simultan (Uji f)	65
Tabel 4.17	Uji Koefisien Determinasi (Uji R^2)	66

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul	Halaman
Gambar 2.1	Kerangka Pikir	32
Gambar 4.1	Hasil Uji Heterokedastisitas	62



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Instrumen Penelitian	88
2	Deskripsi Jawaban Responden (X1)	92
3	Deskripsi Jawaban Responden (X2)	93
4	Deskripsi Jawaban Responden (Y)	94
5	Hasil SPSS	95
6	Surat Penetapan Pembimbing	103
7	Surat Izin Melaksanakan Penelitian dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	105
8	Surat Izin Meneliti dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	106
9	Surat Selesai Meneliti dari Kantor Desa Mirring	107
10	Dokumentasi Penelitian	108
11	Biodata Penulis	110

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang pada sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	te
ث	ṣa	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ه	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ڙ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)
ڙ	Ra	R	Er
ڙ	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ڙ	Syin	Sy	es dan ye
ڻ	ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ءـ	Hamzah	‘	apostrof
يـ	Ya	Y	Ye

Hamzah (ءـ) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun.

Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (‘)

b. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong

- 1) Vokal tunggal (monoftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasi sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
́	<i>Fathah</i>	a	a
ׁ	<i>Kasrah</i>	i	i
ׂ	<i>Dammah</i>	u	u

- 2) Vokal rangkap (diftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Contoh:

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *haul*

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ُ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
ُ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

- c. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ـ ... ـ ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
ـ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
ـ	<i>dammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

ماتَ : *māta*

(رماء) : *ramā*

قَنْدَلْ : *aila*

لَمْعَةٌ : *vamūtu*

d. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu:

- 1) *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t].
- 2) *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>raudah al-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَادِلَةُ	: <i>al-madīnah al-fādilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tc̄v̄dīd* (̄), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbanā</i>
نَجِيْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
نُعَمْ	: <i>nu“ima</i>
عَدُوُّ	: <i>‘aduwuwun</i>

Jika huruf ى ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (—), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī.

Contoh:

عَلَىٰ	: ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)
عَرَبِيٌّ	: ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf ݂ (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan oleh garis mendatar (-), contoh:

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الْزَلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (*az-zalzalah*)

الْفَسْفَةُ : *al-falsafah*

الْبَلَادُ : *al-bilādu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (), hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَلْمِيُونَ : *ta'murūna*

الْتَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

h. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

i. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللهِ دِينُ اللهِ *dīnūllāh*

Adapun *tā' marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ *hum fī rahmatillāh*

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang

al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammādūn illā rasūl

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīh al-Qur‘ān

Nasīr al-Dīn al-Tūsi

Abū Nasr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Dalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muhammād ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walid Muhammād (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammād Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan: Zaīd, Nasr Hāmīd Abū)

2. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = *subhānahū wa ta‘ālā*

saw. = *sallallāhu ‘alaihi wa sallam*

a.s. = *‘alaihi al-salām*

H = Hijrah

M = Masehi

SM	=	Sebelum Masehi
1.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali 'Imrān/3: 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دم	=	بدونمكان
صلع	=	صلی الله عليه وسلم
ط	=	طبعه
دن	=	بدون ناش
الخ	=	إلى آخر ها/ آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor).

Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia).

Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan akuntansi sektor publik, khususnya di Indonesia semakin pesat dengan adanya era reformasi dalam pelaksanaan kebijakan pemerintahan, otonomi daerah dan desentralisasi fisikal yang menitik beratkan pada pemerintah daerah. Pesatnya globalisasi yang menuntut daya saing di setiap negara juga menuntut daya saing di setiap pemerintah daerah, dimana daya saing pemerintah daerah ini diharapkan akan mampu tercapai melalui peningkatan kemandirian pemerintahan. UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah membuat reformasi akuntansi keuangan daerah dan manajemen keuangan daerah kemudian banyak dilakukan dalam rangka memenuhi tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik pemerintah daerah atas pengelolaan keuangan publik.¹

Sistem pengelolaan keuangan pemerintahan di Indonesia untuk mendukung pembangunan pada awalnya menerapkan sistem sentralisasi namun setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 32 kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menjadi sistem pemerintahan Indonesia menjadi desentralisasi.² Sistem ini telah memperluas wewenang pelaksanaan otonomi daerah dengan menyerahkan sepenuhnya segala urusan pemerintahan kepada pemerintah daerah. Salah satu kewenangan yang diberikan pada daerah yaitu kewenangan dalam menggali dan mengolah pendapatan daerah. hal ini sesuai dengan

¹ "Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Pemerimbangan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Daerah," n.d.

² Yadi Arodhiskara and Zulkarnain, "Analisis Efektifitas Dan Efisiensi Retribusi Pedagang Kaki Lima Di Kota Parepare," *Jurnal Ekonomi Pembangunan STIE Muhammadiyah Palopo* 3, no. 2 (2017): 43–51.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 yang menyatakan pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun tahun anggaran yang bersangkutan.

UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan daerah diberikan otonomi yang seluas-luasnya untuk mengurus semua penyelenggaraan pemerintah diluar kewenangan pemerintah pusat untuk membuat kebijakan daerah yang berhubungan dengan peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, serta otonomi yang nyata dan bertanggung jawab.³ Nyata memiliki arti melaksanakan apa yang menjadi urusannya berdasarkan kewenangan yang diberikan dan karakteristik dari suatu wilayah. Bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggarannya harus sejalan dengan maksud dan tujuan pemberian otonomi yaitu memajukan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Akuntansi pemerintahan memiliki peran dalam pengelolaan keuangan publik guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, mulai dari tata kelola keuangan pusat, daerah, maupun desa. Prinsip dalam akuntansi pemerintahan seperti transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan public bukan hanya sebagai bentuk kewajiban dari pemerintah pusat, namun juga daerah seperti desa.⁴

Desa merupakan unit pemerintahan terkecil yang memiliki posisi strategis dalam pembangunan nasional. Desa juga merupakan wilayah yang penduduknya masih kuat dengan budaya, adat istiadat dan norma-norma yang berlaku pada desa tersebut dan kebiasaan hidupnya masih bergantung pada hasil alam dan rata-rata pekerjaan

³ “Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.,” n.d.

⁴ Michael H J Malumperas, Hendrik Manossoh, and Sonny Pangerapan, “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Di Desa Bowongkali, Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara),” *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 9, no. 1 (2021).

mereka adalah seorang petani.⁵ Desa adalah kesatuan masyarakat yang berbadan hukum memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) (UU RI Nomor 6 Pasal 1 Ayat 1 Tahun 2014 Tentang Desa), pemerintahan memberikan kewenangan yang lebih besar kepada desa untuk mengelola aggaran secara mandiri melalui dana desa.⁶ Dana desa bertujuan untuk mempercepat pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat partisipasi masyarakat daam pengelolaan sumber daya lokal.

Menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Desa adalah kesatuan masyarakat yang sah dengan batas wilayah yang dapat mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan, termasuk yang terkait dengan pengelolaan keuangan dan Alokasi Dana Desa (ADD), pemilihan kepala desa (kades), dan pembangunan desa.⁷ Dengan demikian, Desa diberi arahan berupa panduan teknis perencanaan dan pengelolaan keuangan. Kebijakan Umum Anggaran memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD), kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya yang memuat langkah-langkah kongkrit dalam pencapaian target, dan

⁵ A Halim Iskandar, *SDGs Desa: Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020).

⁶ “Undang-Undang Nomor 6 Pasal 1 Ayat 1 Tahun 2014 Tentang Desa.,” n.d.

⁷ “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.,” n.d.

teknis penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, serta hal-hal khusus lainnya.⁸

Alokasi dana desa adalah anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa yang bersumber dari bagi hasil pajak daerah serta dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten.⁹ Pada tahun 2025, Pemerintah Indonesia mengalokasikan total Dana Desa sebesar Rp71 triliun. Alokasi ini terdiri dari Rp69 triliun yang dihitung berdasarkan tahun anggaran sebelumnya dan Rp2 triliun yang dihitung pada tahun berjalan. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2015 Pasal 29 menyatakan formula pembagian dihitung berdasarkan jumlah desa, dengan bobot sebesar 90 persen dan hanya 10 persen yang dihitung dengan menggunakan formula jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografi. Pemerintah lebih menekankan pada asas pemerataan, dimana setiap desa memiliki jumlah dana desa yang relatif sama. Setiap desa menerima alokasi Dana Desa yang bervariasi, tergantung pada kriteria tertentu seperti jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Oleh karena itu, tidak ada jumlah minimal yang seragam untuk setiap desa. Informasi rinci mengenai alokasi Dana Desa per desa dapat diakses melalui situs resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Kebijakan ini memiliki konsekuensi terhadap proses pengelolaan dana desa yang seharusnya dilaksanakan

⁸ Ira Sahara, “Analisis Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Pelaksanaan Program Kerja Di Dinas Pekerjaan Umum Kota Parepare,” *Economos: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 3 (2020): 118–28.

⁹ Ade Irma Seska Arina, Vecky A J Masinambow, and Een N Walewangko, “Pengaruh Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa Terhadap Indeks Desa Membangun Di Kabupaten Minahasa Tenggara,” *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah* 22, no. 3 (2021): 22–41.

secara efektif yang didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen publik yang baik agar terhindarkan dari resiko terjadinya penyimpangan, penyelewengan dan korupsi.¹⁰

Akuntabilitas adalah kunci keberhasilan pengelolaan anggaran karena mencerminkan sejauh mana pemerintahan desa mampu mempertanggung jawabkan pengelolaan anggaran kepada masyarakat.¹¹ Selain itu, partisipasi masyarakat juga penting untuk memastikan bahwa anggaran digunakan sesuai kebutuhan masyarakat dan aspirasi masyarakat. Akuntabilitas sendiri merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap keberhasilan ataupun kegagalan pemerintah dalam tata kelola daerah termasuk dalam hal keuangan.¹²

Akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah kinerja aparatur pemerintah desa di mulai dari perencanaan hingga pengawasan kegiatan yang menggunakan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, dimana pemerintah dan aparat desa harus mempertanggungjawabkan dan melaporkan setiap pelaksanaan kegiatan secara tertib kepada masyarakat maupun kepada jajaran pemerintah diatasnya sesuai dengan perundang- undangan.¹³

“Account” adalah kata inti di mana kata akuntabilitas berasal (menghitung). Islam menjelaskan bahwa meskipun dosa di akhirat hanya sebesar biji dzarrah, namun setiap perbuatan yang dilakukan dalam kehidupan ini akan diperhitungkan (dihitung).

¹⁰ Harianto, Mudji Rahardjo, and Bambang Martin Baru, *Pengelolaan Dana Desa Dan Tindak Pidana Korupsi (Konsep, Aplikasi, Dan Implementasinya)*, ed. Drs. Agus Wiyaka. M.Si. (Surabaya: UD. Dalle Nurul Utama Wisma Permai Tengah, 2023).

¹¹ Muhrayani, “Pengaruh Kompetensi Perangkat Desa, Komitmen Organisasi, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa” (Universitas Hasanuddin, 2021).

¹² Andi Ayu Frihatni, Nirwana Nirwana, and Syamsuddin Syamsuddin, “Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dalam Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kota Parepare,” *Economos : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 4, no. 3 (2021): 229–39.

¹³ Ridha Fajri and Julita Julita, “Pengaruh Transparansi, Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Aparatur Desa, Dan Pemahaman Regulasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa,” *Jurnal Al-Iqtishad* 17, no. 2 (2021): 209.

Jadi, percaya pada hari akhir adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap Muslim. Karena setiap tindakan pada akhirnya akan dimintai pertanggung jawaban, maka setiap muslim dituntut untuk bertanggung jawab atas apa yang terjadi di dunia saat ini. Sebagaimana Al- Qur'an menjelaskan dalam Q.S Az-Zalzalah/99:7-8.

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (٧) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (٨)

Terjemahannya:

(7) Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya (8) Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula.¹⁴

Pengelolaan Alokasi Dana Desa akan berdampak pada peningkatan kualitas kerja perangkat desa dalam memberikan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat. Selain itu, dampak bagi masyarakat adalah masyarakat mengetahui program apa saja yang didanai oleh Alokasi Dana Desa sehingga mudah dalam mengawasi pelaksanaan kegiatan pembangunan desa apabila terjadi penyimpangan dan kendala-kendala di desa. Kecenderungan kurangnya partisipasi masyarakat berperan terhadap tersedianya informasi tersebut.¹⁵

Partisipasi masyarakat merupakan faktor-faktor keberuntungan dalam mempersiapkan pembangunan masyarakat desa. Partisipasi Masyarakat yaitu suatu peranan aktif di dalam publik terhadap *software* yang dilakukan didalam pemerintahan, yang ditunjukan untuk mengontrol maupun mengevaluasi kinerja pemerintahan dalam upaya mencegah terjadinya penyelewengan penyalahgunaan wewenang.¹⁶

¹⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, Qur'an Karim And translation With Transliterations,(semarang: PT. Karya Toha,2018)

¹⁵ Wahyuni Sri Nur and Fitri, "Peningkatan Transparansi, Akuntabilitas, Dan Partisipatif Melalui Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Tellumpanuae Kabupaten Maros," *Jurnal Dedikasi Masyarakat* 3, no. 1 (2019): 1–9.

¹⁶ Eka Sri Setyawati, "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat, Pengelolaan Dan Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Pada Kecamatan Reban Kabupaten Batang)" (Universitas Islam Sultan Agung, 2022).

Keterlibatan masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam acara-acara yang disponsori pemerintah dengan tujuan memantau dan menilai kinerja pemerintah untuk menghentikan penyalahgunaan kekuasaan. Prinsip partisipasi yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat sangat penting untuk menghimpun gagasan dan menilai kinerja pemerintah dalam menyusun pedoman dan kebijakan anggaran.¹⁷

Meskipun pemerintah telah mengalokasikan anggaran besar melalui Dana Desa, tantangan terkait efektivitas pengelolaan anggaran desa masih sering terjadi. Beberapa permasalahan utama yang sering dihadapi antara lain rendahnya tingkat akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran, kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, hingga adanya dugaan penyalahgunaan anggaran. Hal ini menyebabkan anggaran desa sering kali tidak mampu memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat.

Salah satu temuan di lapangan yang diperoleh oleh peneliti menunjukkan bahwa terdapat beberapa desa di Kabupaten Polewali Mandar yang belum mengelola anggaran desa secara optimal. Salah satunya adalah sebuah desa di Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, di mana fasilitas umum yang ada belum mendapatkan perhatian memadai dari aparat desa dan beberapa program yang belum terlaksana. Kondisi ini menyebabkan masyarakat kesulitan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari karena keterbatasan fasilitas. Selain itu, masyarakat juga memiliki akses yang terbatas terhadap informasi mengenai penyusunan dan penggunaan anggaran desa. Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pun masih sangat minim.

Berdasarkan uraian dan penjabaran latar belakang yang telah dijelaskan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Akuntabilitas, dan

¹⁷ Abu Huraerah, *Pengorganisasian Dan Pengembangan Masyarakat: Model Dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan* (Bandung: Humaniora, 2008).

Partisipasi Masyarakat Terhadap Efektivitas Anggaran Desa Pada Desa Mirring Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang terdapat pada penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Apakah Akuntabilitas memiliki pengaruh signifikan terhadap Efektivitas Anggaran Desa?
2. Apakah Partisipasi Masyarakat memiliki pengaruh signifikan terhadap Efektivitas Anggaran Desa?
3. Apakah Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat berpengaruh secara simultan terhadap Efektivitas Anggaran Desa?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh signifikan Akuntabilitas terhadap Efektivitas Anggaran Desa.
2. Untuk mengetahui pengaruh signifikan Partisipasi Masyarakat terhadap Efektivitas Anggaran Desa.
3. Untuk mengetahui apakah Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat berpengaruh secara simultan terhadap Efektivitas Anggaran Desa.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka kegunaan penelitian ini baik bersifat teoritis maupun bersifat praktis ialah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan memberikan sumbangan konseptual bagi peneliti sejenis maupun penelitian selanjutnya dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan untuk perkembangan dan kemajuan dunia pendidikan, dan dengan penelitian ini diharapkan juga mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi penelitian selanjutnya, terutama yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas anggaran desa.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang lebih luas khususnya megenai pengaruh akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat terhadap efektivitas anggaran dana desa di pemerintahan desa.

b. Bagi Pemerintah Desa

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi dalam mengelola dana desa bagi perangkat desa dan pengelola keuangan desa terhadap akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat terhadap efektivitas anggaran dana di desa Mirring, kec. Binuang, kab. Polewali mandar.

c. Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan dan motivasi kepada masyarakat untuk ikut aktif kegiatan pemerintah desa dalam melakukan pengawasan pada penggunaan dana desa.

d. Bagi Almamater

Penelitian ini diharapkan menjadi referensi dan informasi bagi mahasiswa yang lainnya dan dapat menjadi pertimbangan bagi penelitian serupa pada masa mendatang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian yang mempunyai kaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti dianggap penelitian yang relevan. Peneliti berupaya mencari perbandingan dan sumber inspirasi baru ketika menemukan penelitian yang relevan. Selain itu, penelitian sebelumnya menunjukkan keunikan penelitian dan membantu penempatannya. Terdapat sejumlah jurnal atau skripsi yang relevan dengan usulan penelitian berdasarkan temuan pencarian.

1. Penelitian Zultan Saputra pada tahun 2023 dengan skripsi yang berjudul “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Lieue Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar”. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, dengan jumlah sampel yang diambil sebanyak 64 responden yang terdiri masyarakat Desa Lieue. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu dengan mengedarkan pertanyaan dalam bentuk kuesioner. Metode analisis penelitian dilakukan dengan menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas, transparansi dan partisipasi secara bersamaan berpengaruh signifikan terhadap variabel afektivitas pengelolaan dana desa.¹⁸ Persamaan penelitian diatas dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu terdapat pada variabel independen yakni Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat. Adapun

¹⁸ Zulfan Saputra, “Pengaruh Akuntabilitas Transparansi Dan Partisipasi masyarakat terhadap efektivitas Pengelolaan Dana Desa Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Lieue Kecamatan Darussalam Kabupatenaceh Besar” (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2023).

perbedaan penelitian relevan dan penelitian yang akan dilakukan yaitu terletak pada variabel dependen yakni efektivitas pengelolaan dana desa menjadi Efektivitas Anggaran Desa.

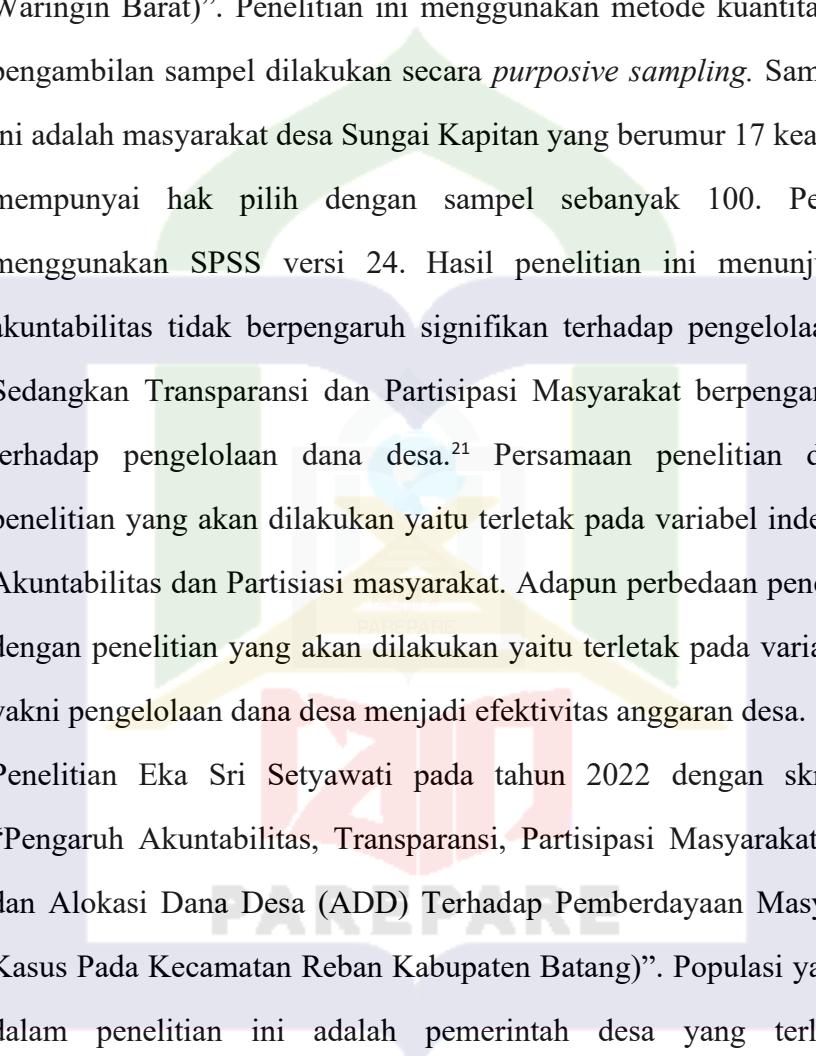
2. Penelitian Lisa Robiatu Sakdiyah pada tahun 2022 dengan skripsi berjudul “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat, dan Sistem Keuangan Desa Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris pada Desa Se-Kecamatan Bangsri)”. Data dalam penelitian ini adalah data primer yang didapatkan dari penyebaran kuesioner dengan menggunakan skala pengukuran *Likert*. Sampel penelitian ini adalah 12 desa di Kecamatan Bangsri dengan jumlah responden sebanyak 107 orang. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling* dengan kriteria adalah perangkat desa di Kecamatan Bangsri yang terlibat langsung dalam pengelolaan dana desa dan memiliki pengalaman minimal bekerja 1 tahun. Data dianalisis menggunakan analisis Regresi Linier Berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan dana desa, transparansi berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan dana desa, partisipasi masyarakat positif berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan dana desa, dan sistem keuangan desa berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara.¹⁹ Persamaan penelitian diatas dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu terletak pada variabel independen yakni Akuntabilitas dan

¹⁹ Lisa Robiatu Sakdiyah, “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat, Dan Sistem Keuangan Desa Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa Se-Kecamatan Bangsri)” (Universitas Tidar, 2022).

Partisiasi masyarakat. Adapun perbedaan penelitian elevan dan penelitian yang akan dilakukan yaitu terletak pada objek desa yang akan diteliti.

3. Penelitian Cindi Praditasari pada tahun 2021 dengan skripsi berjudul “Pengaruh Efektifitas, Akuntansi, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa Di Desa Tanjung Rejo Kecamatan Wuluhan”. Penelitian ini menggunakan metode penyebaran kuesioner dengan teknik pengambilan sampel *purposive sampling*. Analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Populasi dari penelitian ini adalah Kepala Desa, Perangkat Desa, RT dan RW, Lembaga Kemasyarakatan serta masyarakat Desa Tanjungrejo Kecamatan Wuluhan. Hasil Penelitian Ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel efektivitas dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa tidak berpengaruh terhadap pembangunan desa. Variabel transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa secara parsial berpengaruh terhadap pembangunan desa. Secara simultan variabel efektivitas, akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa berpengaruh terhadap pembangunan desa.²⁰ Persamaan penelitian diatas dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu terletak pada variabel independen yakni Akuntabilitas dan Partisiasi masyarakat. Adapun perbedaan penelitian relevan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu terletak pada variabel yang menggunakan 4 variabel independen sedangkan penelitian yang akan dilakukan hanya memiliki 2 variabel independen dan juga terletak pada variabel dependen.

²⁰ Cindi Pradipta Sari, “Pengaruh Efektivitas, Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa Di Desa Tanjungrejo Kecamatan Wuluhan” (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mandala Jember, 2021).

- 
4. Penelitian Norhasanah pada tahun 2022 dengan skripsi berjudul “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa (di Desa Sungai Kapitan, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kota Waringin Barat)”. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan teknik pengambilan sampel dilakukan secara *purposive sampling*. Sampel penelitian ini adalah masyarakat desa Sungai Kapitan yang berumur 17 keatas atau sudah mempunyai hak pilih dengan sampel sebanyak 100. Pengujian data menggunakan SPSS versi 24. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Sedangkan Transparansi dan Partisipasi Masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa.²¹ Persamaan penelitian diatas dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu terletak pada variabel independen yakni Akuntabilitas dan Partisiasi masyarakat. Adapun perbedaan penelitian relevan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu terletak pada variabel dependen yakni pengelolaan dana desa menjadi efektivitas anggaran desa.
 5. Penelitian Eka Sri Setyawati pada tahun 2022 dengan skripsi berjudul “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat, Pengelolaan dan Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Pada Kecamatan Reban Kabupaten Batang)”. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemerintah desa yang terlibat didalam pemberdayaan masyarakat pada 15 desa yang berada di Kecamatan Reban, Kabupaten Batang dengan jumlah sampel sebanyak 75 respondent. Teknik

²¹ Norhasanah, “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Di Desa Sungai Kapitan, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat)” (Universitas Islam Negeri Walisongo, 2022).

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuisioner, Teknik analisis data menggunakan analisis regresi. Keabsahan data diperoleh melalui uji validitas dan uji reliabilitas. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas, transaparansi, partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat sedangkan untuk pengelolaan dan alokasi dana desa berpengaruh positif terhadap pemberdayaan masyarakat.²² Persamaan penelitian diatas dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu terletak pada variabel independen yakni Akuntabilitas dan Partisipasi masyarakat. Adapun perbedaan penelitian relevan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu terdapat pada variabel independen yakni pengelolaan dan alokasi dana desa (ADD) dan juga perbedaan selanjutnya terletak pada variabel dependen yaitu pemberdayaan masyarakat dan juga objek desa yang akan diteliti.

6. Penelitian Iin Widyaningrum pada tahun 2023 dengan skripsi berjudul “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Klaten”. Sampel dalam penelitian ini yaitu kepala desa, sekretaris desa, bendahara dan BPD. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei kuesioner dan wawancara. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda menggunakan aplikasi SPSS15. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel akuntabilitas dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana desa di

²² Eka Sri Setyawati, “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat, Pengelolaan Dan Alokasi Dana Desa (Add) Terhadap Pemberdayaan Masyarakat” (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022).

Kabupaten Klaten. Sedangkan variabel tansparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Klaten.²³ Persamaan penelitian diatas dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu terletak pada variabel independen yakni Akuntabilitas dan Partisipasi masyarakat. Adapun perbedaan penelitian relevan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu terletak pada variabel dependen yakni efektivitas pengelolaan dana desa menjadi efektivitas anggaran desa dan juga terdapat pada objek desa yang akan diteliti.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori *Agency* merupakan konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual antara *principal* dan *agents*. *Agency* adalah keterikatan hubungan antara dua pihak yang mana pihak satu disebut dengan *agent*, yaitu yang diberikan kewenangan untuk melakukan perbuatan atas nama serta dibawah pengawasan pihak lain yaitu *principal*. Pihak *principal* sebagai pihak yang memberikan kewenangan kepada pihak lain dalam hal ini adalah *agent*, untuk melakukan semua kegiatan atas nama *principal*s yang kapasitasnya sebagai pengambil keputusan serta melakukan pengawasan tindakan.²⁴ *Agency Theory* akan relevan digunakan untuk menjelaskan hubungan *principal* dan agen dalam pengelolaan dana desa.

Berkaitan dengan masalah keagenan, praktik pengelolaan keuangan pada

²³ Iin Widyaningrum, “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Klaten” (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023).

²⁴ Faizzatus Solihah, Biana Adha Inapty, and Adhitya Bayu Suryantara, “Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dan Peran Perangkat Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Empiris Pada Desa Se-Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur),” *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi* 2, no. 1 (2022): 136–54.

organisasi sektor publik merupakan konsep yang didasarkan pada teori keagenan. Dalam hal ini *agents* merupakan pemerintah desa dan *principals* merupakan masyarakat, Hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat sebagai pihak yang akan mengambil bagian dalam penentuan kebijakan desa dapat digambarkan sebagai hubungan keagenan.²⁵ Jadi fungsi pemerintah sebagai (agen) yang diberi kewenangan untuk melaksanakan kewajiban tertentu yaitu mengelola dana desa dengan baik dimana pengelolaan yang baik harus melibatkan masyarakat (partisipal) sebagai pengguna informasi keuangan dan pengambilan kebijakan baik secara langsung maupun tidak secara langsung. *Agency theory* beranggapan bahwa banyak terjadi *information asymmetry* antara pihak agen (pemerintah) yang mempunyai akses langsung terhadap informasi dengan pihak prinsipal (masyarakat). Adanya *information asymmetry* inilah yang memungkinkan terjadinya penyelewangan atau korupsi oleh agen. Sebagai konsekuensinya, pemerintah daerah harus dapat meningkatkan pengendalian internalnya atas kinerjanya sebagai mekanisme *checks and balance* agar dapat mengurangi *information asymmetry*.

Keterkaitan antara teori keagenan dengan penelitian ini adalah pemerintahan desa (*agent*) berkewajiban memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan aktivitasnya terkait dengan pengelolaan dana desa kepada masyarakat (*principal*). Akuntabilitas memberikan evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan organisasi. Transparansi memberikan informasi yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintahan

²⁵ Difa Sari Astantri Fadhilah, Hardi Utomo, and Budi Riyanti, "Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat Dan Kebijakan Desa," *ProBank* 9, no. 2 (2024): 231–44.

desa dalam pengelolaan dana desa yang dipercayakan kepadanya dan partisipasi masyarakat dapat memberikan masukan kepada pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa.

2. Akuntabilitas

Akuntabilitas berasal dari bahasa inggris, yaitu *accountability* atau *accountable* yang artinya “dapat dipertanggungjawabkan”. Akuntabilitas merupakan suatu pertanggungjawaban kepada publik atas semua aktivitas atau kinerja yang telah dilakukan oleh suatu lembaga kepada pihak yang memiliki kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas ini bertujuan untuk menginformasikan seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik itu konsisten dengan kehendak masyarakat banyak.

Akuntabilitas adalah suatu bentuk pertanggungjawaban oleh pihak yang diberi kepercayaan oleh masyarakat/individu dimana nantinya terdapat keberhasilan atau kegagalan di dalam pelaksanaan tugasnya tersebut dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.²⁶ Pertanggungjawaban tersebut berkaitan langsung dengan aktivitas birokrasi dalam memberikan pelayanan sebagai kontra prestasi atas hak-hak yang telah dipungut langsung maupun tidak langsung dari masyarakat. Pertanggungjawaban perlu dilakukan melalui media yang selanjutnya dapat dikomunikasikan baik kepada pihak internal maupun kepada pihak eksternal (publik) secara periodik maupun secara tak terduga sebagai suatu kewajiban hukum bukan karena sukarela.

Akuntabilitas dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi

²⁶ Sri Wahyuni Nur, “Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Tellumpanuae Kabupaten Maros,” *Um Jember Press*, 2021, 725–39.

amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban.²⁷

Akuntabilitas berfungsi sebagai komponen penggerak jalannya kegiatan perusahaan/organisasi, sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing. Akuntabilitas berkaitan erat dengan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil kinerjanya pada pelayanan publik dan menyampaikan secara transparan kepada masyarakat.

Akuntabilitas adalah suatu bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media mempertanggungjawabkan yang dilaksanakan secara periodik.²⁸

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala aktivitas, kinerja, dan hasil kerja suatu organisasi, khususnya organisasi publik, kepada pihak yang memiliki wewenang. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa kebijakan dan kegiatan yang dijalankan sesuai dengan kehendak dan kepentingan masyarakat. Akuntabilitas mencakup pelaporan, penyajian, dan pengungkapan kegiatan secara transparan dan periodik, serta berfungsi sebagai alat kontrol dan penggerak dalam pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi.

Dilihat dalam pandangan islam, akuntabilitas dijelaskan dalam Q.S Al-Mudatssir/74:38.

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ (٣٨)

Terjemahannya:
"Setiap orang bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukannya".

²⁷ Mardiasmo, *AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - Edisi Terbaru* (Andi, 2021).

²⁸ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, (Yogyakarta: Andi, 2018).

Ayat yang sesuai dengan bentuk akuntabilitas di atas merupakan cara mensosialisasikan atau mengkomunikasikan kepada publik perihal pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan agar dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat.

a. Jenis-jenis Akuntabilitas

Ada 2 (dua) jenis akuntabilitas, yaitu:²⁹

- 1) Akuntabilitas Verbal, dimana seseorang mampu mempertanggungjawabkan keputusan yang diambil kepada jabatan otoritas yang lebih tinggi.
- 2) Akuntabilitas Horizontal, tanggung jawab organisasi terhadap masyarakat dan lingkungan eksternal yang tidak ada hubungan antara atasan dan bawahan.

b. Ruang Lingkup Akuntabilitas

Beberapa Ruang Lingkup yang terdapat dalam akuntabilitas ini adalah sebagai berikut:³⁰

- 1) Akuntabilitas hukum dan kejujuran, yaitu bahwa setiap kebijakan patuh terhadap hukum dan peraturan serta pelaksanaan kegiatan organisasi yang sehat untuk menghindari terhadap penyalahgunaan jabatan.
- 2) Akuntabilitas manajerial, yaitu pengelolaan kegiatan organisasi secara ekonomis, efisien, dan efektif. Selain itu, bertanggungjawab pada proses dan pelaksanaan program yang telah ditetapkan.
- 3) Akuntabilitas program, yaitu pengelolaan program untuk mendukung tujuan organisasi, dan bertanggungjawab pada keputusan yang telah

²⁹ Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik* (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2019).

³⁰ Alfian Ibnu Sina, *Implementasi Transparansi Dan Akuntabilitas Sebagai Upaya Pencegahan Korupsi (Studi Pada DPC PKB Di Ngawi)* (Surakarta: Febi IAIN Surakarta, 2017).

diambil beserta dampaknya.

- 4) Akuntabilitas kebijakan, yaitu pengelolaan uang publik secara ekonomis, efisien, dan efektif serta bertanggungjawab pada inefisiensi pelaksanaan organisasi.
- 5) Akuntabilitas finansial, yaitu penghindaran pemborosan, kebocoran, dan korupsi, serta publikasi hasil laporan keuangan kepada masyarakat.

c. Prinsip-prinsip Akuntabilitas

Dalam pelaksanaan akuntabilitas dalam instansi pemerintahan, prinsip-prinsip yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut:³¹

- 1) Adanya komitmen dari pimpinan dalam melaksanakan pengelolaan agar akuntabel
- 2) Adanya suatu sistem untuk menjamin penggunaan sumber daya secara baik agar sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.
- 3) Harus bersedia menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran anggaran.
- 4) Mempunyai orientasi pada tujuan pencapaian visi dan misi, serta hasil dan juga manfaat yang akan diperoleh.
- 5) Jujur, objektif, transparan, serta inovatif sebagai agen perubahan manajemen instansi pemerintah.

Akuntabilitas adalah kewajiban agen (pemerintah) untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat *principal*. Akuntabilitas dimaksudkan untuk memastikan kepercayaan masyarakat pada

³¹ Rahardjo Adisasmita, *Manajemen Pemerintah Daerah* (Universitas Hasanuddin: Pusat Pengembangan Keuangan dan Ekonomi Daerah, 2009).

pemerintah serta menjembatani kesenjangan antara masyarakat dengan pemerintah.³²

Sementara itu, dalam Buku Kamus Akuntansi menyatakan akuntabilitas sebagai tanggung jawab individu atau organisasi terhadap kinerja suatu fungsi tertentu.³³ Akuntabilitas dapat berarti pemberian informasi dan pengungkapan atas aktivitas dan kinerja keuangan suatu instansi kepada pemangku kepentingan, sehingga hak para pemangku kepentingan yaitu hak untuk mengetahui, hak diberi informasi, dan hak untuk didengar aspirasinya dapat dipenuhi. Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas merupakan sebuah kewajiban individu/organisasi untuk memenuhi tanggung jawab terhadap kinerjanya sebagai amanah yang telah diberikan oleh pemangku kepentingan *stakeholder*.

d. Indikator Untuk Mengukur Akuntabilitas

Dalam penelitian ini, indikator untuk mengukur akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah sebagai berikut:³⁴

- 1) Adanya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dana desa.
- 2) Tercapainya tujuan dalam pengelolaan dana desa dalam satu tahun anggaran.
- 3) Adanya akses informasi laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa.
- 4) Adanya pengawasan oleh tim pelaksana.

3. Partisipasi Masyarakat

Secara bahasa Partisipasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu *participation* yang

³² Andreani Avelyni Leda Making and Nur Handayani, "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dana Desa," *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)* 10, no. 10 (2021).

³³ Ardiyos, *Kamus Besar Akuntansi* (Jakarta: Citra Harta Prima, 2016).

³⁴ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: Andi, 2009).

berarti peran serta. Sedangkan secara istilah, partisipasi adalah peran atau keikutsertaan mengambil bagian dalam suatu kegiatan tertentu. Partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan atau keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan yang meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan yang dikerjakan oleh masyarakat.³⁵

Partisipasi masyarakat bisa menjadi salah satu faktor yang menentukan efektivitas pengelolaan dana desa. Semakin tinggi keterlibatan masyarakat maka semakin tinggi pula rasa tanggungjawaban mereka untuk melaksanakan keputusan yang telah dihasilkan serta pembangunan akan menjadi semakin baik kedepannya.³⁶ Pembangunan yang baik merupakan hasil dari pengelolaan dana desa yang baik pula.

Dilihat dalam pandang islam, sebagaimana dijelaskan oleh Tanthowi dalam bukunya unsur-unsur manajemen Islam bahwa partisipasi masyarakat ini dilakukan dengan berpengetahuan luas, kreatif, inisiatif, peka, lapang dada dan selalu tanggap sebagaimana dijelaskan dalam Q.S Al-Mujadalah/58:11.

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَاقْسِحُوا يَقْسِحَ اللَّهُ لَكُمْ هُوَ إِذَا قِيلَ أَنْتُمْ رُوا فَأَنْتُمْ رُوا يَرْفَعُ اللَّهُ أَنَّهُمْ لَمْ يَرْفَعُوا إِنَّمَا يَرْفَعُ اللَّهُ مَا يَعْلَمُ فَمَنْ يَعْلَمُ أَعْلَمُ بِمَا يَعْلَمُ إِنَّمَا يَرْفَعُ اللَّهُ مَا يَعْلَمُ فَمَنْ يَعْلَمُ أَعْلَمُ بِمَا يَعْلَمُ (١١)

Terjemahannya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu: “Berlapang-lapanglah dalam majlis”, Maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: “Berdirilah kamu”, Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

³⁵ Moch Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa: Berbasis Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Mekanisme Akuntabilitas* (Setara, 2012).

³⁶ Siti Kholizah Hasibuan, “Pengaruh Kompetensi Aparat Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Kecamatan Tambusai Utara,” *Journals of Indonesian Multidisciplinary Research* 1, no. 1 (2022): 40–55.

Partisipasi adalah suatu gejala demokrasi dimana orang diikutsertakan di dalam perencanaan serta pelaksanaan dari segala sesuatu yang berpusat pada kepentingan dan juga ikut memikul tanggung jawab sesuai dengan tingkat kematangan dan tingkat kewajibannya. Partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan.³⁷

Berdasarkan pengertian di atas, konsep partisipasi memiliki makna yang luas dan beragam. Secara singkatnya dapat disimpulkan bahwa partisipasi adalah keikutsertaan atau peran aktif individu maupun kelompok masyarakat dalam suatu kegiatan, terutama dalam proses pembangunan. Secara istilah, partisipasi mencakup keterlibatan dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga pemanfaatan hasil kegiatan pembangunan. Dalam konteks pengelolaan dana desa, partisipasi masyarakat sangat penting karena dapat meningkatkan rasa tanggung jawab dan efektivitas pembangunan. Partisipasi juga merupakan wujud dari demokrasi, di mana masyarakat turut memberi masukan berupa pikiran, tenaga, waktu, keahlian, dana, atau materi demi tercapainya tujuan bersama.

a. Unsur-unsur Partisipasi Masyarakat

Dalam partisipasi masyarakat terdapat lima unsur, di antaranya sebagai berikut:³⁸

- 1) Keikutsertaan dan keterlibatan dalam suatu kegiatan.
- 2) Kesadaran secara sukarela.

³⁷ I Nyoman Sumaryadi, *Sosiologi Pemerintahan* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010).

³⁸ Isbandi Rukminto Adi, *Pemberdayaan Masyarakat: Konsep Dan Aplikasi* (Jakarta: LP3ES, 2003).

- 3) Adanya sikapro aktif
 - 4) Adanya kontribusi yang diberikan, baik dari partisipasi fisik maupun non fisik.
 - 5) Adanya kesepakatan-kesepakatan.
- b. Jenis-Jenis Partisipasi Masyarakat

Partisipasi Masyarakat dibagi menjadi empat jenis yaitu:³⁹

- 1) Partisipasi dalam pengambilan keputusan. Partisipasi ini terutama berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat berkaitan dengan gagasan atau ide yang menyangkut kepentingan bersama. Wujud partisipasi dalam pengambilan keputusan ini antara lain seperti ikut menyumbangkan gagasan atau pemikiran, kehadiran dalam rapat, diskusi dan tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan.
- 2) Partisipasi dalam pelaksanaan. Partisipasi ini meliputi menggerakkan sumber daya dana, kegiatan administrasi, koordinasi dan penjabaran program. Partisipasi dalam pelaksanaan merupakan kelanjutan dalam rencana yang telah digagas sebelumnya baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, amupun tujuan.
- 3) Partisipasi dalam pengambilan manfaat. Partisipasi dalam pengambilan manfaat tidak lepas dari hasil pelaksanaan yang telah dicapai baik yang berkaitan dengan kualitas maupun kuantitas. Dari segi kualitas dapat dilihat dari output, sedangkan dari segi kualitas dapat dilihat dari persentase keberhasilan program.
- 4) Partisipasi dalam evaluasi. Partisipasi dalam evaluasi berkaitan dengan

³⁹ Siti Irene Astuti Dwiningrum, *Desentralisasi Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011).

pelaksanaan program yang sudah direncanakan untuk mengetahui ketercapaian program yang sudah direncanakan sebelumnya.

c. Prinsip-Prinsip Partisipasi Masyarakat

Menurut Departemen For International Development (DFID) dalam Panduan Pelaksanaan Pendekatan Partisipatif, prinsip-prinsip partisipasi masyarakat adalah sebagai berikut:⁴⁰

- 1) Cakupan. Semua orang atau wakil-wakil dari semua kelompok yang terkena dampak dari hasil-hasil suatu keputusan atau proses proyek pembangunan.
- 2) Kesetaraan dan kemitraan. Pada dasarnya setiap orang mempunyai keterampilan, kemampuan dan prakarsa serta mempunyai hak untuk menggunakan prakarsa tersebut dalam setiap proses guna membangun dialog tanpa memperhitungkan jenjang dan struktus masing-masing pihak.
- 3) Transparansi. Semua pihak harus dapat menumbuh-kembangkan komunikasi dan iklim berkomunikasi terbuka dan kondusif sehingga menimbulkan dialog.
- 4) Kesetaraan kewenangan. Bergagai pihak yang terlibat harus menyeimbangkan distribusi keswenangan dan kekuasaan untuk menghindari terjadinya dominasi.
- 5) Kesetaraan tanggung jawab. Berbagai pihak mempunyai tanggung jawab yang jelas dalam setiap proses karena adanya kesetaraan kewenangan dan keterlibatannya dalam proses pengambilan keputusan dan langkah-

⁴⁰ Monique Sumampouw, *Perencanaan Darat-Laut Yang Terintegrasi Dengan Menggunakan Informasi Spasial Yang Partisipatif*. (Jakarta: Pradya Paramita, 2004).

langkah selanjutnya.

- 6) Pemberdayaan. Keterlibatan berbagai pihak tidak lepas dari segala kekuatan dan kelemahan yang dimiliki setiap pihak, sehingga melalui keterlibatan aktif dalam setiap proses kegiatan, terjadi suatu proses saling belajar dan saling memberdayakan satu sama lain.
- 7) Kerjasama. Diperlukan adanya kerja sama berbagai pihak yang terlibat untuk saling berbagi kelebihan guna mengurangi berbagai kelemahan yang ada, khususnya yang berkaitan dengan kemampuan sumber daya manusia.

d. Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat, yaitu sebagai berikut:⁴¹

- 1) Kesediaan suatu komunitas untuk menerima pemberdayaan bergantung pada situasi yang dihadapinya.
- 2) Pemikiran bahwa pemberdayaan tidak untuk semua orang dan adanya persepsi dari pemegang kekuasaan dalam komunitas tersebut bahwa pemberdayaan dapat mengorbankan diri mereka sendiri.
- 3) Ketergantungan adalah budaya, dimana masyarakat sudah terbiasa berada dalam hirarki, birokrasi dan kontrol manajemen yang tegas sehingga membuat mereka terpola dalam berpikir dan berbuat dalam rutinitas.
- 4) Dorongan dari para pemimpin setiap komunitas untuk tidak mau melepaskan kekuasaannya, karena inti dari pemberdayaan adalah berupa pelepasan sebagian kewenangan untuk diserahkan kepada masyarakat

⁴¹ I Nyoman Sumaryadi, *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom Dan Pemberdayaan Masyarakat*. (Jakarta: Citra Utama, 2010).

sendiri.

- 5) Adanya batas pemberdayaan, terutama terkait dengan siklus pemberdayaan yang membutuhkan waktu relatif lama dimana pada sisi yang lain kemampuan dan motivasi setiap orang berbeda-beda.
- 6) Adanya kepercayaan dari para pemimpin komunitas untuk mengembangkan pemberdayaan komunitasnya.
- 7) Pemberdayaan tidak kondusif bagi perubahan yang cepat.
- 8) Pemberdayaan membutuhkan dukungan asumber daya yang besar, baik dari segi pembiayaan maupun waktu.

e. Manfaat Penerapan Partisipasi Masyarakat

Adapun beberapa manfaat dan penerapan partisipasi masyarakat sebagai berikut:⁴²

- 1) Partisipasi dapat digunakan untuk mengoreksi hal-hal kebijakan yang penting, seperti perencanaan, dan alokasi anggaran.
- 2) Keikutsertaan masyarakat dan organisasi masyarakat dalam kegiatan acara pemerintahan yang menjadi sumber adanya pendekatan- pendekatan dan program yang afirmatif.
- 3) Menghasilkan program-program yang lebih inovatif dan deskriminatif.
- 4) Proses partisipasi masyarakat berpotensi menjadi media komunikasi yang dapat mengurangi konflik dengan syarat forum dikelola menjadi forum deliberatif.

f. Indikator Untuk Mengukur Partisipasi Masyarakat

Adapun Beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur partisipasi

⁴² Ralph Adolph, "Urgensi Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Kebijakan Dan Perencanaan Anggaran," 2016, 1–23.

masyarakat dalam pengelolaan dana desa di antara lainnya:⁴³

- 1) Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan Anggaran dana desa.
- 2) Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan Anggaran dana desa.
- 3) Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dan penilaian hasil.
- 4) keterlibatan masyarakat dalam penerimaan program dan pemanfaatan hasil.

4. Efektivitas Anggaran Desa

a. Efektivitas

Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan.⁴⁴

Ada 2 pendekatan dalam menilai keefektifan berdasarkan tujuan dan teori sistem. Berdasarkan pendekatan tujuan menekankan pada pencapaian tujuan yaitu dengan usaha kerjasama. Pendekatan teori sistem menekankan pada adaptasi terhadap tuntutan ekstern sebagai kriteria penilaian keefektifan.⁴⁵

Efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan.⁴⁶ Artinya apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya, maupun mutunya, maka dapat dikatakan efektif.

Efektivitas adalah hasil guna kegiatan pemerintah dalam mengurus dan mengatur keuangan yang dimiliki dengan cara sedemikian rupa, sehingga

⁴³ Mendagri, "Permendagri Nomor 113 Tahun 2014," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2013): 1689–99.

⁴⁴ Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*.

⁴⁵ James H. Donnelly James L. Gibson, John M. Ivancevich, *Organizations: Behavior, Structure, Processes*, 9th ed. (Irwin, 1997, n.d.).

⁴⁶ J. Ravianto, *Produktivitas Dan Pengukuran* (Jakarta: Bina Aksara, 2014).

memungkinkan program dapat direncanakan dan dijalankan untuk mencapai tujuan pemerintahan dengan biaya serendah-rendahnya dan dalam waktu yang secepat-cepatnya.⁴⁷

b. Anggaran

Anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis, yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan, yang dinyatakan dalam unit (kesatuan) moneter dan berlaku untuk jangka waktu (periode) tertentu yang akan datang.⁴⁸

Anggaran merupakan rencana tertulis menegenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang, tetapi dapat juga dinyatakan dalam satuan barang maupun jasa.⁴⁹

c. Desa

Desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan berwenang mengatur serta mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan

⁴⁷ Jovanka Mamuaja, Freddy Semuel Kawatu, and Anita Kambey, “Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa: Di Desa Sea Satu Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa,” *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 2021, 249–58.

⁴⁸ M. Munandar, *Anggaran Perusahaan* (BPFE Yogyakarta, 2001).

⁴⁹ M. Nafarin, *Penganggaran Perusahaan* (Jakarta: Salemba Empat, 2007).

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁵⁰

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa Efektivitas anggaran desa merupakan ukuran sejauh mana anggaran yang direncanakan secara sistematis dan dinyatakan dalam bentuk kuantitatif baik dalam satuan uang, barang, maupun jasa dapat digunakan secara optimal untuk mencapai tujuan pembangunan desa. Efektivitas ini terlihat dari kemampuan desa dalam menyelesaikan program dan kegiatan sesuai rencana, baik dari aspek waktu, biaya, maupun mutu, serta dari kontribusi output terhadap pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi efektivitas dapat dilakukan melalui pendekatan tujuan, yang menilai pencapaian hasil melalui kerja sama, dan pendekatan sistem, yang melihat kemampuan desa beradaptasi terhadap dinamika eksternal. Dalam konteks pemerintahan desa, efektivitas anggaran mencerminkan hasil guna pengelolaan keuangan desa untuk mensejahterakan masyarakat melalui perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan secara efisien, tepat sasaran, dan transparan sesuai dengan kebutuhan serta aspirasi masyarakat lokal.

d. Aspek-Aspek Efektivitas Anggaran Desa

Efektivitas anggaran desa mencakup beberapa aspek, antara lain:⁵¹

- 1) Pencapaian Tujuan.
- 2) Penggunaan Sumber Daya.
- 3) Partisipasi Masyarakat.
- 4) Transparansi dan Akuntabilitas.

⁵⁰ "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1 Ayat (1)," n.d.

⁵¹ Permendesa, "Permendesa Nomor 19 Tahun 2017," *Permendesa Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018*, 2017, 1–67.

- 5) Monitoring dan Evaluasi.
 - 6) Kesesuaian dengan Rencana Pembangunan.
- e. Indikator Untuk Mengukur Efektivitas Anggaran Desa

Tingkat efektivitas dapat dilihat dan dinilai dari hasil yang telah dicapai. Apabila hasil pekerjaan sesuai tujuan atau mencapai target sasaran, maka dapat dikatakan efektif. Sebaliknya, apabila hasil pekerjaan yang dilakukan tidak sesuai dengan target sasaran, maka hal itu tidak efektif. Untuk itu diperlukan suatu ukuran atau indikator untuk melihat efektivitas.

Indikator untuk mengukur efektivitas Anggaran Desa, yaitu:⁵²

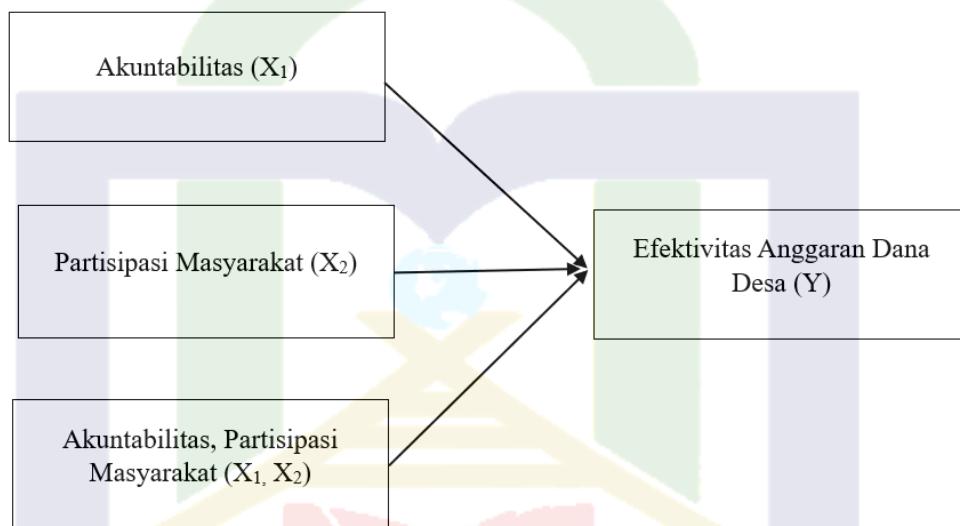
- 1) Kesesuaian dengan Rencana pembangunan, apakah anggaran digunakan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- 2) Capaian Program dan Kegiatan, Sejauh mana program yang dibiayai anggaran desa mencapai hasil yang direncanakan.
- 3) Tingkat Kepuasan Masyarakat, apakah masyarakat merasakan manfaat dari penggunaan anggaran tersebut.
- 4) Ketepatan Waktu dan realisasi Anggaran, apakah anggaran direalisasikan sesuai jadwal dan target.
- 5) Efisiensi dan Transparansi, seberapa baik dana desa dikelola tanpa pemborosan dan dengan keterbukaan kepada masyarakat.

C. Kerangka Pikir

Pada penelitian ini variabel dibagi menjadi dua yaitu variabel dependen dan variabel independen, dimana variabel dependen yaitu efektivitas anggaran desa,

⁵² Farida Kurnianingrum, “Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2021,” *Ditjen Bina Pemerintah Desa*, 2021, 1–19.

sementara variabel independen yaitu akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Pokok bahasan pada penelitian ini yaitu Pengaruh Akuntabilitas (X1) terhadap Efektivitas Anggaran Desa (Y), dan Pengaruh Partisipasi Masyarakat (X2) terhadap Efektivitas Anggaran Desa (Y). Serta Pengaruh kedua variabel independen atau variabel X secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau variabel Y. Pokok bahasan tersebut dituangkan dalam model kerangka pemikiran teoritik sebagai berikut:



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

D. Hipotesis

Tujuan penelitian ini adalah untuk menelaah hubungan sistematis antara variabel-variabel yang biasa disajikan dalam bentuk hipotesis yang merupakan suatu unsur penelitian yang amat penting. Hipotesis merupakan jawaban sementara suatu permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul. Perumusan hipotesis atau dugaan sementara dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Akuntabilitas Terhadap Efektivitas Anggaran Desa

Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil

akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan akuntabilitas kepada masyarakat tersebut harus dilaksanakan karena mengacu pada tujuan adanya dana desa, yaitu untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, dimana upaya tersebut dapat dilaksanakan dengan pemberdayaan masyarakat.⁵³ Dengan adanya pemikiran tersebut, I Made Yoda & Ni Ketut Rasmini pada tahun 2019 melaksanakan penelitian dengan judul Pengaruh Akuntabilitas, Tranparasi, dan Partisipasi Masyarakat pada Efektivitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Abisemal Kabupaten Badung memperoleh kesimpulan bahwa variable akuntabilitas secara signifikan berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan dana desa. Oleh karena itu, berdasarkan pemikiran dan penelitian tersebut, dalam penelitian ini di peroleh hipotesis

H1: Akuntabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap Efektivitas Anggaran Desa di Desa Mirring Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar

2. Partisipasi Masyarakat terhadap Efektivitas Anggaran Desa

Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan peran serta masyarakat dalam kegiatan pemerintahan, sehingga berdampak pada proses evaluasi dan kontrol kinerja pemerintah dan meminimalisir penyalahgunaan wewenang.⁵⁴ Untuk mewujudkan anggaran yang efektif diperlukan partisipasi masyarakat untuk memberikan masukan dalam penyusunan arah dan kebijakan anggaran. Dengan adanya pemikiran tersebut, I Made Yoda & Ni Ketut Rasmini pada tahun 2019 melaksanakan penelitian dengan judul Pengaruh Akuntabilitas, Tranparasi, dan Partisipasi Masyarakat pada Efektivitas

⁵³ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,” n.d.

⁵⁴ Hayat, *Buku Kebijakan Publik*, Intrans Publishing, 2018.

Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Abisemal Kabupaten Badung memperoleh kesimpulan bahwa salah satu variable partisipasi masyarakat secara signifikan berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan dana desa. Selain itu, penelitian yang dilaksanakan oleh Nita Maina, dkk pada tahun 2022 dengan judul pengaruh akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa se-kecamatan Sambi Boyolali juga menyatakan bahwa partisipasi masyarakat secara positif dan signifikan berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa. Oleh karena itu, hipotesis ke dua dalam penelitian ini adalah:

H2: Partisipasi Masyarakat berpengaruh secara signifikan terhadap Efektivitas Anggaran Desa di Desa Mirring Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar

3. Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat terhadap Efektivitas Anggaran Desa

Akuntabilitas mengacu pada kewajiban pemerintah desa untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran desa kepada masyarakat. Ketika pemerintah desa mengatakan transparan, kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan yang diambil akan meningkat, sehingga mendukung efektivitas penggunaan anggaran.⁵⁵ Di sisi lain, partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan anggaran anggaran memungkinkan warga untuk terlibat dalam pengambilan keputusan, sehingga kebutuhan dan prioritas mereka lebih terakomodasi. Dengan demikian, akuntabilitas dan pertisipasi masayarakat yang baik diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan ketepatan sasaran program yang dijalankan, sehingga hasil yang dicapai lebih memuaskan dan sesuai dengan harapan masyarakat. Oleh karena itu,

⁵⁵ Jamaluddin Hos and Muhammad Basri, “Analisis Akuntabilitas Dan Transpransi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Tetehaka) Kecamatan Puriala Kabupaten Konawe” 15, no. 2 (2024): 233–41.

hipotesis ketiga yang dikembangkan ialah:

H3: Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat berpengaruh secara simultan terhadap Efektivitas Anggaran Desa di Desa Mirring Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Data kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan *positivistic* (data konkret), data penelitian berupa angka-angka yang akan diukur menggunakan statistik sebagai alat uji penghitungan, berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk menghasilkan suatu kesimpulan.⁵⁶ Dalam menganalisis data yang diperoleh dilapangan, peneliti menggunakan *software* seperti SPSS versi 26. Penelitian kuantitatif dipilih karena bertujuan untuk menguji hubungan antar akuntabilitas dan partisipasi masyarakat (variabel independen) terhadap efektivitas anggaran desa (variabel dependen) secara objektif dan sistematis.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi

Lokasi penelitian ini di lakukan di Desa Mirring Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama 1 bulan lamanya, disesuaikan dengan kebutuhan peneliti.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi merupakan wilayah generalisasi (sebuah kelompok) yang terdiri dari objek dan subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristi tertentu yang telah

⁵⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Bandung: Alfabeta, 2018).

ditentukan oleh peneliti untuk diteliti dan diambil kesimpulan.⁵⁷ Populasi adalah keseluruhan dari kumpulan elemen yang memiliki sejumlah karakteristik umum, yang mencakup bidang-bidang untuk diteliti.

Desa Mirring terletak di kecamatan Binuang kabupaten Polewali Mandar provinsi Sulawesi Barat yang memiliki luas wilayah sekitar 22.00 km², dan terdiri atas 3 dusun diantaranya dusun Tappina, dusun Mirring, dan dusun Silopo. Desa Mirring sendiri memiliki kurang lebih 3.605 penduduk.

2. Sampel

Sampel ialah bagian dari populasi yang menjadi sumber data dalam penelitian, dimana populasi merupakan bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi.⁵⁸

Teknik sampling ialah teknik pengambilan sampel, untuk menentukan sampel yang akan digunakan. Untuk pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *non-probability sampling* dengan pendekatan *purposive sampling* (pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan).

Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu yang dilakukan oleh peneliti sendiri yang didasarkan pada ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Sampel yang diambil dari populasi haruslah benar-benar valid dan representatif sehingga dapat mengukur sesuatu dengan baik.⁵⁹ Sampel dalam penelitian ini adalah Kepala desa, sekertaris desa, perangkat desa, kepala dusun, ketua BPD, kader posyandu, ketua PKK, dan beberapa Masyarakat dari setiap dusun, dengan jumlah sampel sebanyak 35 orang.

⁵⁷ Sugiyono.

⁵⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017).

⁵⁹ Sugiyono.

D. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Teknik pengumpulan data merupakan proses mencari, mencatat dan mengumpulkan semua data dari hasil observasi lapangan yang kemudian dicatat berbagai bentuk data yang ditemukan dilapangan. Dalam penelitian ini menggunakan data primer. Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung dari peneliti untuk menjawab masalah serta tujuan yang diteliti.⁶⁰ Karena menggunakan data primer, maka dalam penelitian ini teknik yang digunakan untuk pengumpulan data adalah menggunakan angket/kuesioner dan dokumentasi.

b. Angket (Kuesioner)

Kuesioner merupakan cara pengumpulan data dengan menyebarluaskan daftar pernyataan kepada responden, dengan tujuan agar responden memberikan jawaban atau respon dari pernyataan yang ada dalam kuesioner. Kuesioner tersebut disebarluaskan kepada responden yang dalam hal ini adalah Aparatur Desa dan Masyarakat setempat dengan cara disebar atau menemui responden secara langsung.⁶¹

c. Dokumentasi

Teknik dokumenter atau disebut juga dokumentasi merupakan teknik-teknik pengumpulan data penelitian melalui sejumlah dokumentasi (informasi yang didokumentasikan) berupa dokumentasi tertulis maupun dokumentasi terekam.⁶²

2. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah

⁶⁰ Muh Yani Balaka, "Metodologi Penelitian Kuantitatif," 2022.

⁶¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D*, Cetakan Ke (Bandung: Alfabeta, 2020).

⁶² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*.

dengan menggunakan aplikasi SPSS 26. SPSS adalah salah satu program komputer yang khusus dibuat untuk mengolah data dengan metode statistik tertentu.

E. Definisi Operasional Variabel

Operasional variabel merupakan sebuah atribut, sifat atau nilai dari objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang telah ditentukan oleh peneliti yang selanjutnya akan ditarik kesimpulannya.⁶³ Untuk menentukan jenis dan indikator dari variabel-variabel yang memiliki keterkaitan dalam penelitian, operasionalisasi sangat dibutuhkan dalam penelitian ini. Tujuan dari operasionalisasi variabel untuk memberikan kredibilitas pada metodologi dan sebagai penentuan skala pengukuran dari tiap-tiap variabel. Sehingga hasil uji hipotesis dengan pemakaian alat bantu dapat terlaksana dengan baik. pada penelitian ini terdapat dua jenis variable yaitu variabel independen yakni akuntabilitas (X_1) dan partisipasi masyarakat (X_2) dan variabel dependen yakni efektivitas anggaran desa (Y).

Tabel 3.1 Operasional Variabel

No.	Variabel	Devinisi Variabel	Indikator
1	Akuntabilitas	Akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala aktivitas, kinerja, dan hasil kerja pada desa mirroring kepada pihak yang memiliki wewenang. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa kebijakan dan kegiatan yang dijalankan sesuai dengan	<p>a. Adanya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dana desa.</p> <p>b. Tercapainya tujuan dalam pengelolaan dana desa dalam satu tahun anggaran.</p> <p>c. Adanya akses informasi laporan pertanggungjawaban</p>

⁶³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*. (Bandung: Alfabeta, 2015)

No.	Variabel	Devinisi Variabel	Indikator
		kehendak dan kepentingan masyarakat.	pengelolaan dana desa. d. Adanya pengawasan oleh tim pelaksana.
2	Partisipasi Masyarakat	Partisipasi Masyarakat adalah keikutsertaan atau peran aktif individu maupun kelompok masyarakat dalam suatu kegiatan, terutama dalam proses pembangunan. Partisipasi mencakup keterlibatan dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga pemanfaatan hasil kegiatan pembangunan.	<p>a. keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pengelolaan dana desa.</p> <p>b. keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa.</p> <p>c. keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dan penilaian hasil.</p> <p>d. keterlibatan masyarakat dalam penerimaan program dan pemanfaatan hasil.</p>
3	Efektivitas Anggaran desa	Efektivitas anggaran desa merupakan ukuran sejauh mana anggaran yang direncanakan secara sistematis yang dapat digunakan secara optimal untuk	a. Kesesuaian dengan Rencana pembangunan, apakah anggaran digunakan sesuai dengan Rencana Pembangunan

No.	Variabel	Devinisi Variabel	Indikator
		mencapai tujuan pembangunan desa.	<p>Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.</p> <p>b. Capaian Program dan Kegiatan, Sejauh mana program yang dibiayai anggaran desa mencapai hasil yang direncanakan.</p> <p>c. Tingkat Kepuasan Masyarakat, apakah masyarakat merasakan manfaat dari penggunaan anggaran tersebut.</p> <p>d. Ketepatan Waktu dan realisasi Anggaran, apakah anggaran direalisasikan sesuai jadwal dan target.</p> <p>e. Efisiensi dan Transparansi, seberapa baik dana desa dikelola tanpa pemborosan dan dengan keterbukaan kepada masyarakat.</p>

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam ataupun sosial yang diamati. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner dengan menggunakan skala pengukuran yakni *skala likert*. Menurut Abdullah (2015) *skala likert* adalah skala yang disarankan pada penjumlahan sikap responden dalam merespon pernyataan berkaitan dengan indikator-indikator suatu konsep atau variabel yang sedang diukur. *Skala likert* ini menggunakan 5 (lima) penilaian instrumen jawaban kuesioner yaitu:

Tabel 3.2 Skala Likert

Skala	Alternatif Jawaban	Keterangan
5	Sangat Setuju	SS
4	Setuju	S
3	Kurang Setuju	KS
2	Tidak Setuju	TS
1	Sangat Tidak Setuju	STS

G. Teknik Analisis Data

1. Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Penelitian ini menggunakan statistik deskriptif untuk memberikan gambaran data yang terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat

kesimpulan yang berlaku secara umum. Pengujian statistik dalam penelitian ini antara lain: mean (rata-rata), standar deviasi dan minimum dan maksimum.

2. Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Uji validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang sebenarnya terjadi pada objek dengan data yang didapatkan oleh peneliti. Uji validitas merupakan untuk mendefinisikan sejauh mana data yang diperoleh melalui instrumen penelitian (dalam penelitian ini kuesioner) akan mengukur apa yang ingin diukur.⁶⁴ Oleh sebab itu data yang valid adalah data yang tidak memiliki perbedaan antara data yang diperoleh oleh peneliti dengan data yang sebenarnya terjadi dilapangan. Standar penilaian uji validitas yang memenuhi syarat yaitu:

- 1) Jika $r_{\text{hitung}} > r_{\text{tabel}}$, maka pertanyaan tersebut dinyatakan valid.
- 2) Jika $r_{\text{hitung}} < r_{\text{tabel}}$, maka pertanyaan tersebut dinyatakan tidak valid.

b. Uji Reliabilitas

Reliabilitas berarti sejauh mana hasil suatu pengukuran memiliki keterpercayaan, konsistensi, kestabilan yang dapat dipercaya. Hasil pengukuran dapat dipercaya jika dalam beberapa kali pengukuran kepada kelompok subjek yang sama ditemukan hasil yang relatif sama. Standar penilaian uji reabilitas yang memenuhi syarat yaitu:

- 1) Jika perolehan koefisien $\alpha_{\text{Cronbach}} > 0,60$ maka kuesioner tersebut dinyatakan reliabel.
- 2) Jika perolehan koefisien $\alpha_{\text{Cronbach}} < 0,60$ maka kuesioner tersebut dinyatakan tidak reliabel.

⁶⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*.

3. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik adalah tahap yang penting pada analisis regresi lineal berganda. Kegunaan dari uji asumsi klasik adalah untuk melengkapi uji statistik yang sudah dilaksanakan yakni uji t dan uji f. Pengujian ini dilakukan untuk memeriksa kualitas data agar diketahui validitas datanya dan untuk menghindari terjadinya estimasi yang bias. Dalam penelitian ini uji asumsi klasik yakni, uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi mempunyai distribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini pengujian normalitas menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dan analisis grafik. Pada uji Kolmogorov-Smirnov memiliki kriteria sebagai berikut:

- 1) Jika nilai $\text{sig} > 0,05$ maka data berdistribusi normal.
- 2) Jika nilai $\text{sig} < 0,05$ maka data tidak berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Tujuan uji multikolinearitas untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi yang tinggi atau sempurna antar variable independen. Model uji regresi yang baik selayaknya tidak terjadi multikolinearitas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas yaitu:

- 1) Menganalisis korelasi antara variabel independen, jika nilai VIF (Variance Inflation Factors) < 10 maka ada multikolinearitas.
- 2) Menganalisis korelasi antara variabel independen, jika nilai VIF (Variance Inflation Factors) > 10 maka tidak ada multikolinearitas/maka tolerance $< 0,01$.

3) Model regresi yang baik adalah model regresi yang tidak adanya korelasi antar variabel independen.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas adalah untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual satu ke pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang memenuhi persyaratan adalah dimana terdapat kesamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap atau disebut homoskedastisitas. Deteksi heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan metode scatter plot dengan memplotkan nilai ZPRED (nilai prediksi) dengan SRESID (nilai residualnya).⁶⁵

4. Analisis Regresi Linear Berganda

Dalam penelitian ini menggunakan persamaan regresi linear berganda karena variabel bebas pada penelitian lebih dari satu yang dimana dilakukan untuk mengetahui Pengaruh Akuntabilitas (X_1), dan Partisipasi Masyarakat (X_2) terhadap Efektivitas Anggaran Desa (Y).

Persamaan regresi linear berganda dalam penelitian ini menggunakan rumus persamaan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1x_1 + b_2x_2 + e$$

Keterangan :

Y = Efektivitas Anggaran Desa

X_1 = Akuntabilitas

X_2 = Partisipasi Masyarakat

a = Konstanta

⁶⁵ Julianis Ansofino and H Yolamalinda & Arfilindo, *Buku Ajar Ekonometrika* (Yogyakarta: Deepublish, 2016).

$b_{1,2}$ = Koefisien regresi variable independen

ϵ = Tingkat Kesalahan atau Eror

5. Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan tiga tes. Yang pertama adalah uji-t yang digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebas (independen) secara parsial terhadap variabel terikat (dependen). Berikutnya yang kedua adalah uji-f yang digunakan untuk melihat pengaruh variabel bebas (independen) satu sama lain terhadap variabel terikat (dependen). Terakhir Uji koefisien Determinasi (R^2) untuk menunjukkan seberapa besar pengaruh hubungan antara variabel bebas (independen) dengan variabel terikat (dependen). Model pengujinya ialah:

a. Uji Statistik Persial (Uji T)

Uji Persial merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara persial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan cara membandingkan nilai t hitung dengan t tabel dengan tingkat kesalahan sebesar 5% atau 0,05 dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Jika signifikansi $> 0,05$ atau $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka hipotesis yang diajukan menyatakan tidak adanya pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.
- 2) Jika signifikansi $< 0,05$ atau $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka hipotesis yang diajukan menyatakan adanya pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.

b. Uji Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk menunjukkan ada atau tidaknya pengaruh semua variabel independen secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen,

dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut:

- 1) Jika nilai F hitung $>$ F tabel dan nilai signifikan < 0.05 , maka secara simultan terdapat pengaruh signifikan variabel independen terhadap variabel dependen.
 - 2) Jika nilai F hitung $<$ F tabel dan nilai signifikan > 0.05 , maka secara simultan tidak terdapat pengaruh signifikan variabel independen terhadap variabel dependen.
- c. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien Determinasi (R^2) menunjukkan seberapa besar pengaruh hubungan antara variabel bebas (independen) dengan variabel terikat (dependen). Koefisien determinasi R^2 pada dasarnya mengukur seberapa baik model dalam menjelaskan variasi variabel terikat (dependen). Nilai koefisien determinasi berkisar antara 0 sampai 1. Jika nilai R^2 mendekati 1 menunjukkan bahwa hasil model regresi baik atau variabel bebas (independen) secara umum dapat menjelaskan variabel terikat (dependen). Sedangkan jika nilai R^2 mendekati 0, berarti variabel independen secara keseluruhan tidak dapat menjelaskan variabel dependen.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Hasil Penelitian

1. Analisis Deskriptif Responden Berdasarkan Karakteristik

Penelitian ini mengambil 35 responden dan profil responden yang di input terdiri dari Umur, Jenis Kelamin dan Jabatan. Adapun hasilnya sebagai berikut:

a. Karakteristik Responden Berdasarkan Umur

Tabel 4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Umur

Frequency		Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
20-30	14	40,0	40,0	40,0
31-40	10	28,6	28,6	68,6
41-50	5	14,3	14,3	82,9
51-60	6	17,1	17,1	100,0
Total	35	100,0	100,0	

Sumber Data: Diolah Peneliti 2025

Berdasarkan tabel 4.1 dapat dilihat bahwa 35 orang yang menjadi sampel penelitian ini. Responden yang berusia 20-30 berjumlah 14 responden dengan persentase 40,0%, responden yang berusia 31-40 berjumlah 10 dengan persentase 28,6%, responden yang berusia 41-50 berjumlah 5 dengan persentase 14,3%, dan responden yang berusia 51-60 berjumlah 6 dengan persentase 17,1. Maka dapat disimpulkan bahwa usia responden pada penelitian ini mayoritas berusia 20-30.

b. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Frequency		Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Laki-Laki	20	57,1	57,1	57,1
Perempuan	15	42,9	42,9	100,0
Total	35	100,0	100,0	

Sumber Data: Diolah Peneliti 2025

Berdasarkan tabel 4.2 dapat dilihat bahwa 35 orang sampel dalam penelitian ini. Responden dengan jenis kelamin Laki-laki berjumlah 20 responden dengan persentase 57,1% dan untuk responden dengan jenis kelamin perempuan berjumlah 15 responden dengan persentase 42,9%. Maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden pada penelitian ini berjenis kelamin laki-laki.

c. Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan

Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan

Frequency		Percent	Valid Percent	Cumulatif Percent
Aparat Desa	10	28,6	28,6	28,6
Guru	5	14,3	14,3	42,9
Kader Posyandu	3	8,6	8,6	51,4
Tokoh Masyarakat	4	11,4	11,4	62,9
Petani	6	17,1	17,1	80,0
IRT	7	20,0	20,0	100,0
Total	35	100,0	100,0	

Sumber Data: Diolah Peneliti 2025

Berdasarkan tabel 4.3 dapat dilihat bahwa 35 orang sampel dalam penelitian ini. Responden dengan jenis pekerjaan aparat desa berjumlah 10 responden dengan

persentase 28,6%, guru berjumlah 5 responden dengan persentase 14,3%, kader posyandu berjumlah 3 responden dengan persentase 8,6%, tokoh masyarakat berjumlah 4 responden dengan persentase 11,4%, petani berjumlah 6 responden dengan persentase 17,1%, dan ibu rumah tangga berjumlah 7 responden dengan persentase 20,0%.

2. Hasil Data Instrumen Penelitian

Tabel 4.4 Distribusi Jawaban Responden Untuk Variabel Akuntabilitas (X1)

No	Akunabilitas	SS	S	KS	TS	STS	Total
		5	4	3	2	1	
1	X1.1	20	12	-	2	1	35
		57,1%	34,3%		5,7%	2,9%	100%
2	X1.2	21	14	-	-	-	35
		60,0%	40,0%				100%
3	X1.3	20	12	-	2	1	35
		57,1%	34,3%		5,7%	2,9%	100%
4	X1.4	21	11	2	-	1	35
		60,0%	31,4%	31,4%		2,9%	100%
5	X1.5	14	15	3	-	3	35
		40,0%	42,9%	8,6%		8,6%	100%

Sumber Data: Diolah Peneliti 2025

Berdasarkan tabel 4.4 sebaran jawaban responden untuk variabel Akuntabilitas (X1) menghasilkan 5 pernyataan dan 35 responden berikut detail penjelasannya:

- Pernyataan pertama, terdapat 20 responden yang menjawab (sangat setuju), 12 responden menjawab (setuju), 2 responden menjawab (tidak setuju), dan 1 responden menjawab (sangat tidak setuju). Jadi jawaban yang

mendominasi adalah sangat setuju bahwa tahapan pengelolaan dana desa melibatkan seluruh unsur masyarakat.

- b. Pernyataan kedua, terdapat 21 responden yang menjawab (sangat setuju), dan 14 responden menjawab (setuju). Jadi jawaban yang mendominasi adalah sangat setuju bahwa kepentingan masyarakat menjadi pertimbangan dan perhatian utama dalam pengelolaan dana desa.
- c. Pernyataan ketiga, terdapat 20 responden yang menjawab (sangat setuju), 12 responden menjawab (setuju), 2 responden menjawab (tidak setuju), dan 1 responden menjawab (sangat tidak setuju). Jadi jawaban yang mendominasi adalah sangat setuju bahwa pengelolaan dana desa dapat mudah diakses dan dapat disajikan secara rinci, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan secara cepat dan tepat.
- d. Pernyataan keempat, terdapat 21 responden yang menjawab (sangat setuju), 11 responden menjawab (setuju), 2 responden menjawab (kurang setuju), dan 1 responden menjawab (sangat tidak setuju). Jadi jawaban yang mendominasi adalah sangat setuju bahwa pengelolaan dana desa telah diawasi dengan baik oleh tim pelaksana.
- e. Pernyataan kelima, terdapat 14 responden yang menjawab (sangat setuju), 15 responden menjawab (setuju), 3 responden menjawab (kurang setuju), dan 3 responden menjawab (sangat tidak setuju). Jadi jawaban yang mendominasi adalah sangat setuju bahwa akuntabilitas sangat diperlukan dalam peningkatan kinerja dari pemerintah desa.

Tabel 4.5 Distribusi Jawaban Responden Variabel Partisipasi Masyarakat (X2)

No	Partisipasi Masyarakat	SS	S	KS	TS	STS	Total
		5	4	3	2	1	
1	X2.1	17 48,8%	18 51,4%	-	-	-	35 100%
2	X2.2	18 51,4%	17 48,8%	-	-	-	35 100%
3	X2.3	14 40,0%	17 48,6%	4 11,4%	-	-	35 100%
4	X2.4	16 45,7%	13 37,1%	6 17,1%	-	-	35 100%
5	X2.5	13 37,1%	16 45,7%	4 11,4%	2 5,7%	-	35 100%

Sumber Data: Diolah Peneliti 2025

Berdasarkan tabel 4.5 sebaran jawaban responden untuk variabel Partisipasi Masyarakat (X2) menghasilkan 5 pernyataan dan 35 responden berikut detail penjelasannya:

- Pernyataan pertama, terdapat 17 responden yang menjawab (sangat setuju), dan 18 responden menjawab (setuju). Jadi jawaban yang mendominasi adalah setuju bahwa masyarakat selalu terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan dana desa.
- Pernyataan kedua, terdapat 18 responden yang menjawab (sangat setuju), dan 17 responden menjawab (setuju). Jadi jawaban yang mendominasi adalah sangat setuju bahwa masyarakat bersedia untuk berkontribusi memberikan sumbangan ide, keahlian, keterampilan, maupun tenaga untuk pelaksanaan program desa.

- c. Pernyataan ketiga, terdapat 14 responden yang menjawab (sangat setuju), 17 responden menjawab (setuju), dan 4 responden menjawab (kurang setuju). Jadi jawaban yang mendominasi adalah setuju bahwa masyarakat bebas dalam menyampaikan aspirasi saran serta kritikan kepada pengelolaan dana desa.
- d. Pernyataan keempat, terdapat 16 responden yang menjawab (sangat setuju), 13 responden menjawab (setuju), dan 6 responden menjawab (kurang setuju). Jadi jawaban yang mendominasi adalah sangat setuju bahwa saran dan kritikan dari masyarakat dijadikan sebagai koreksi untuk pengelolaan dana desa.
- e. Pernyataan kelima, terdapat 13 responden yang menjawab (sangat setuju), 16 responden menjawab (setuju), 4 responden menjawab (kurang setuju), dan 2 responden menjawab (tidak setuju). Jadi jawaban yang mendominasi adalah setuju bahwa menjaga, melestarikan, dan mengaplikasikan hasil dari program yang dilaksanakan.

Tabel 4.5 Distribusi Jawaban Responden Variabel Efektivitas Anggaran Desa (Y)

No	Efektivitas Anggaran Desa	SS	S	KS	TS	STS	Total
		5	4	3	2	1	
1	Y1	20 57,1%	8 22,9%	6 17,1%	-	1 2,9%	35 100%
2	Y2	12 34,3%	17 48,6%	4 11,4%	-	2 5,7%	35 100%
3	Y3	8 22,9%	19 54,3%	7 20,0%	1 2,9%	-	35 100%
4	Y4	8	26	1	-	-	35

		22,9%	74,3%	2,9%			100%
5	Y5	19 54,3%	11 31,4%	5 14,3%	-	-	35 100%

Sumber Data: Diolah Peneliti 2025

Berdasarkan tabel 4.6 sebaran jawaban responden untuk variabel Efektivitas Anggaran Desa (Y) menghasilkan 5 pernyataan dan 35 responden berikut detail penjelasannya:

- Pernyataan pertama, terdapat 20 responden yang menjawab (sangat setuju), 8 responden menjawab (setuju), 6 responden menjawab (kurang setuju), dan 1 responden menjawab (sangat tidak setuju). Jadi jawaban yang mendominasi adalah sangat setuju bahwa anggaran desa telah digunakan sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah desa dan rencana kerja pemerintah desa.
- Pernyataan kedua, terdapat 12 responden yang menjawab (sangat setuju), 17 responden menjawab (setuju), 4 responden menjawab (kurang setuju), dan 2 responden menjawab (sangat tidak setuju). Jadi jawaban yang mendominasi adalah setuju bahwa program yang dibiayai anggaran desa telah mencapai target yang telah direncanakan.
- Pernyataan ketiga, terdapat 8 responden yang menjawab (sangat setuju), 19 responden menjawab (setuju), 7 responden menjawab (kurang setuju), dan 1 responden menjawab (tidak setuju). Jadi jawaban yang mendominasi adalah setuju bahwa masyarakat merasa puas dengan hasil pembangunan yang dibiayai oleh anggaran desa.
- Pernyataan keempat, terdapat 8 responden yang menjawab (sangat setuju), 26 responden menjawab (setuju), dan 1 responden menjawab

(kurang setuju). Jadi jawaban yang mendominasi adalah setuju bahwa anggaran desa direalisasikan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

- e. Pernyataan kelima, terdapat 19 responden yang menjawab (sangat setuju), 11 responden menjawab (setuju), dan 5 responden menjawab (kurang setuju). Jadi jawaban yang mendominasi adalah sangat setuju bahwa anggaran desa dikelola tanpa pemborosan dalam pelaksanaannya dan dengan keterbukaan kepada masyarakat.

3. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif menjelaskan rangkuman terkait ciri-ciri setiap variabel penelitian berdasarkan rata-rata (mean), nilai maksimum, dan nilai minimum.

Tabel 4.7 Hasil Statistik Deskriptif

N		Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Akuntabilitas	35	8	25	21,86	3,191
Partisipasi Masyarakat	35	18	25	21,71	2,080
Efektivitas Anggaran Desa	35	14	25	20,94	2,920
Valid N (listwise)	35				

Sumber Data: Diolah Peneliti 2025

Dari tabel 4.7 menunjukkan bahwa 2 variabel independen (X), yaitu akuntabilitas (X1) dan partisipasi masyarakat (X2) sedangkan 1 variabel dependen adalah efektivitas anggaran desa (Y). Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 35 responden.

Berdasarkan hasil uji deskriptif diatas, dapat kita gambarkan distribusi data yang diperoleh oleh peneliti adalah:

- a. Nilai minimal variabel X1 (Akuntabilitas) yaitu 8, nilai maksimal 25, nilai rata-ratanya 21,86, dan standar deviasinya yaitu 3,191.
- b. Nilai minimal variabel X2 (Partisipasi Masyarakat) yaitu 18, nilai maksimal 25, nilai rata-ratanya 21,71, dan standar deviasinya yaitu 2,080.
- c. Nilai minimal variabel Y (Efektivitas Anggaran Desa) yaitu 14, nilai maksimal 25, nilai rata-ratanya 20,94, dan standar deviasinya yaitu 2,920.

B. Pengujian Persyaratan Analisis Data

1. Uji Validitas

Instrumen penelitian memiliki kemampuan untuk mengukur tujuan dari variabel yang dipelajari, maka penelitian itu valid. Kita dapat membandingkan rhitung dengan r_{tabel} , dimana:

- a. Ketika $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka pertanyaan dikatakan valid.
- b. Ketika $r_{hitung} < r_{tabel}$ maka pertanyaan dikatakan valid.

Dikatakan valid jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ pada taraf signifikan 5% (0,05). Pada penelitian ini df (*Degree of Freedom*) yaitu derajat kebebasan dengan rumus:

$$Df = N-2$$

Keterangan:

Df = Ukuran sampel dikurangi jumlah pembatasan

N = Jumlah sampel dalam penelitian ini (35 sampel) sehingga,

$$Df = (35-2) = 33$$

Pada taraf signifikan 0,05 untuk uji dua arah dan diperoleh nilai r_{tabel} 0,3338.

Jadi, apabila hasil dari r_{hitung} tiap item pertanyaan melebihi angka 0,3338 maka item

pertanyaan dalam penelitian dapat dikatakan valid. Adapun hasil ujinya dalam tabel berikut.

Tabel 4.8 Uji Validitas Variabel Independen (X)

Variabel	No. Item Pernyataan	Nilai r_{hitung}	Nilai r_{tabel}	Nilai Signifikan	Keterangan
Akuntabilitas (X1)	1	0,918	0,3338	0,000	Valid
	2	0,649	0,3338	0,000	Valid
	3	0,918	0,3338	0,000	Valid
	4	0,630	0,3338	0,000	Valid
	5	0,418	0,3338	0,003	Valid
Partisipasi Masyarakat (X2)	1	0,386	0,3338	0,022	Valid
	2	0,813	0,3338	0,000	Valid
	3	0,590	0,3338	0,000	Valid
	4	0,676	0,3338	0,000	Valid
	5	0,676	0,3338	0,000	Valid

Sumber Data: Diolah Peneliti 2025

Berdasarkan tabel 4.8 Hasil uji validitas variabel X, dapat diketahui bahwa nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ dari jumlah 10 item pernyataan yang terdapat dalam kuesioner. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 100% item pernyataan dalam kuesioner tersebut dinyatakan valid.

Tabel 4.9 Uji Validitas Variabel Dependen (Y)

Variabel	No. Item Pernyataan	Nilai r_{hitung}	Nilai r_{tabel}	Nilai Signifikan	Keterangan
Efektivitas Anggaran Desa (Y)	1	0,812	0,3338	0,000	Valid
	2	0,808	0,3338	0,000	Valid
	3	0,714	0,3338	0,000	Valid
	4	0,456	0,3338	0,000	Valid

5	0,791	0,3338	0,000	Valid
---	-------	--------	-------	-------

Sumber Data: Diolah Peneliti 2025

Berdasarkan pada tabel 4.9 Hasil uji validitas Y, dapat diketahui bahwa nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ dari jumlah 5 item pernyataan yang terdapat dalam kuesioner. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 100% item pernyataan dalam kuesioner tersebut dinyatakan valid.

2. Uji Reliabilitas

Untuk menguji reliabilitas diterapkan uji konsistensi internal dengan menggunakan nilai *Cronbach Alpha*, Kriteria yang digunakan adalah:

- Jika nilai *Cronbach Alpha* $> 0,60$ maka pernyataan-pernyataan yang digunakan untuk mengukur variabel adalah reliabel.
- Jika nilai *Cronbach Alpha* $< 0,60$ maka pernyataan-pernyataan yang digunakan untuk mengukur variabel adalah tidak reliabel.

Tabel 4.10 Uji Reliabilitas Variabel (X)

No	Variabel	Nilai Cronbach Alpha	Nilai Reliabilitas	Keterangan
1	Akuntabilitas	0,740	0,60	Reliabel
2	Partisipasi Masyarakat	0,604	0,60	Reliabel

Sumber Data: Diolah Peneliti 2025

Berdasarkan tabel 4.10 hasil uji reliabilitas variabel X diperoleh nilai Variabel X1 (Akuntabilitas) = 0,740, Variabel X2 (Partisipasi Masyarakat) = 0,604, nilai tersebut lebih besar dari 0,60 maka disimpulkan bahwa seluruh instrumen variabel X penelitian ini reliabel.

Tabel 4.11 Uji Reliabilitas Variabel (Y)

No	Variabel	Nilai Cronbach Alpha	Nilai Reliabilitas	Keterangan
1	Efektivitas Anggaran Desa	0,774	0,60	Reliabel

Sumber Data: Diolah Peneliti 2025

Berdasarkan tabel 4.11 hasil uji variabel Y diperoleh nilai variabel Y (Efektivitas Anggaran Desa) = 0,774, nilai tersebut lebih besar dari 0,60, maka disimpulkan bahwa seluruh instrumen variabel Y penelitian ini reliabel.

3. Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan analisis lebih lanjut terhadap data yang telah dikumpulkan, uji asumsi klasik digunakan yang terdiri dari uji normalitas, heterokedastisitas, dan uji multikolinieritas. Tujuannya adalah untuk menghasilkan model regresi yang memenuhi kriteria BLUE (*Best Linier Unbiased Estimator*), yang berarti adanya hubungan sempurna, linier, dan pasti antara beberapa atau semua variabel yang dijelaskan dalam model regresi.

a. Uji Normalitas

Tujuan dilakukan uji normalitas terhadap serangkaian data adalah untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini uji normalitas data menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov. Kriteria pengambilan keputusan dengan pendekatan Kolmogorov-Smirnov adalah sebagai berikut:

- 1) Nilai sig. atau signifikan atau nilai probabilitas $< 0,05$ distribusi data adalah tidak normal.
- 2) Nilai sig. atau signifikan atau nilai probabilitas $> 0,05$ distribusi data adalah normal.

Tabel 4.12 Uji Normalitas

One-Sampel Kolmogorov-Smirnov Test

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		35
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	252.573.714
Most Extreme Differences	Absolute	.147
	Positive	.112
	Negative	-.147
Test Statistic		.147
Asymp. Sig. (2-tailed)		.054 ^c
a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data. c. Lilliefors Significance Correction.		

Sumber Data: Diolah Peneliti 2025

Uji Kolmogorov Smirnov memiliki 3 pendekatan yakni *Asymptotic Only*, *Monte Carlo* dan *Exact*. Berdasarkan hasil uji normalitas data yang dilakukan peneliti menggunakan pendekatan *Asymptotic Only* dimana diperoleh nilai $0,054^0$ yang artinya nilai tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa nilai residual berdistribusi secara normal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk melihat ada atau tidaknya kolerasi yang tinggi antara variabel-variabel bebas dalam suatu model regresi linear berganda. Jika ada kolerasi yang tinggi di antara variabel-variabel bebasnya, maka hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikatnya menjadi terganggu. Apabila nilai VIF berada di sekitar angka 1-10, maka dikatakan tidak terdapat masalah multikolinearitas

dan apabila nilai *tolerance* > 0,10, maka dikatakan tidak terdapat masalah multikolinearitas pada penelitian ini dapat dilihat sebagai beikut:

Tabel 4.13 Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	5.473	5.508		.994	.328	
	Total_X1	.408	.140	.446	2.918	.006	.999
	Total_X2	.301	.215	.215	1.403	.170	.999

a. Dependent Variable: Total_Y

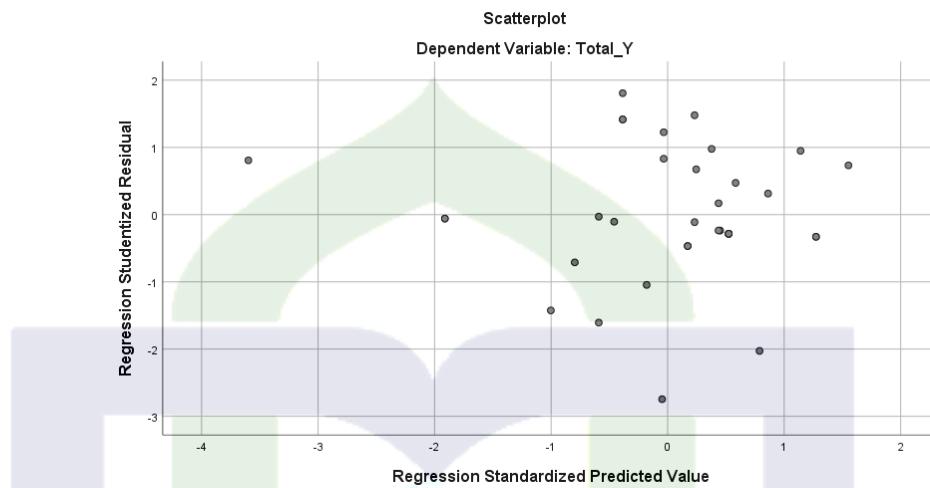
Sumber Data: Diolah Peneliti 2025

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada tabel menunjukkan bahwa nilai VIF yang diperoleh variabel Akuntabilitas (X1) dan Partisipasi Masyarakat (X2) 1,001 < 10,0 dan nilai *tolerance* yang diperoleh Akuntabilitas (X1) dan Partisipasi Masyarakat (X2) sebesar 0,999 > 0,01 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varians dan residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang memenuhi persyaratan adalah dimana terdapat kesamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap atau disebut homoskedastisitas. Deteksi heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan metode scatter plot dengan memplotkan nilai ZPRED (nilai

prediksi) dengan SRESID (nilai residualnya). Berikut ini ialah hasil uji heterokedastisitas yang dilakukan pada penelitian ini.



Sumber Data: Diolah Peneliti 2025

Gambar 4.1 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas dengan metode *scatterplot* yang telah dilakukan menunjukkan bahwa titik-titik residual menyebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu seperti pola mengerucut, melengkung atau simetris. Pola penyebaran yang acak ini menunjukkan bahwa varians residual bersifat konstan di seluruh rentang nilai prediksi, yang berarti asumsi heterokedastisitas terpenuhi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak mengalami masalah heterokedastisitas.

4. Uji Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda dilakukan untuk menguji pengaruh antara dua variabel atau lebih. Hal ini dilakukan guna mengetahui apakah regresi yang diperoleh dapat mengestimasikan perubahan nilai variabel dependen atau tidak. Model dari regresi linear berganda dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.14 Uji Regresi Linear Berganda

Model		Coefficients ^a						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	5.473	5.508		.994	.328		
	Total_X1	.408	.140	.446	2.918	.006	.999	1.001
	Total_X2	.301	.215	.215	1.403	.170	.999	1.001
a. Dependent Variable: Total_Y								

Sumber Data: Diolah Peneliti 2025

Berdasarkan tabel 4.14 didapatkan nilai persamaan regresi linear dalam analisis atau penelitian ini sebagai berikut:

$$Y = 5.473 + 0.408 + 0.301$$

Persamaan regresi linear berganda tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut ini:

- Nilai koefisien sebesar 5,473 berarti nilai ini menunjukkan bahwa jika semua variabel independen (Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat) bernilai nol, maka prediksi efektivitas anggaran desa adalah 5,473.
- Nilai koefisien pada variabel akuntabilitas 0,408 berarti ini menunjukkan bahwa setiap pemahaman akan meningkatkan efektivitas anggaran desa sebesar 0,408, dengan asumsi variabel lain tetap. Namun, pengaruh ini tidak signifikan secara statistik, mengingat hasil uji t menunjukkan tidak ada pengaruh signifikan.
- Nilai koefisien pada variabel partisipasi masyarakat sebesar 0,301 berarti ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu unit pada partisipasi masyarakat akan menurunkan efektivitas anggaran desa sebesar 0,301.

Namun pengaruh ini tidak signifikan secara statistik mengingat hasil uji t menunjukkan tidak adanya pengaruh signifikan.

C. Pengujian Hipotesis

a. Uji Statistik Parsial (Uji t)

Suatu pengaruh dikatakan signifikan jika nilai probabilitas dari hasil uji statistik lebih kecil dari tingkat signifikan yang telah ditentukan. Suatu variabel dikatakan berpengaruh secara signifikan positif dalam statistik jika dua syarat ini terpenuhi secara bersamaan yaitu nilai signifikan $< 0,05$ dan koefisien regresi bernilai positif.⁶⁶

Uji t mengukur pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian ini berupaya untuk menunjukkan seberapa besar pengaruh suatu variabel independen dalam menjelaskan perubahan variabel dependen.

1. Jika nilai sig. $< 0,05$ atau $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka terdapat pengaruh variabel X terhadap Y
2. Jika nilai sig. $> 0,05$ atau $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y.

Tabel 4.15 Uji Statistik Parsial (Uji t)

Coefficients ^a						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	5.473	5.508		.994	.328
	Total_X1	.408	.140	.446	2.918	.006
	Total_X2	.301	.215	.215	1.403	.170

a. Dependent Variable: Total Y

Sumber Data: Diolah Peneliti 2025

⁶⁶ Imam Ghosali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*, 2018.

Dari hasil uji parsial yang diperoleh dapat dilihat pada tabel menunjukkan bahwa pada variabel akuntabilitas diperoleh nilai t hitung $2.918 >$ nilai t tabel (1.69389) dan nilai signifikan $0.006 < 0.05$ artinya variabel akuntabilitas memiliki pengaruh terhadap efektivitas anggaran desa, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis satu (H_1) diterima. Pada variabel partisipasi masyarakat diperoleh t hitung $1.403 <$ nilai t tabel (1.69389) dan nilai signifikan $0.170 > 0.05$ artinya variabel partisipasi masyarakat tidak memiliki pengaruh terhadap efektivitas anggaran desa, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis dua (H_2) ditolak.

b. Uji Simultan (Uji F)

Uji simultan adalah metode pengujian yang dilakukan untuk melihat apakah variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Jika nilai F hitung $>$ F tabel dan nilai signifikan $< 0,05$, maka secara simultan terdapat pengaruh signifikan variabel independen terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai F hitung $<$ F tabel dan nilai signifikan $0,05$, maka secara simultan tidak terdapat pengaruh signifikan variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel 4.16 Uji Simultan (F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	72.988	2	36.494	5.384	.010 ^b
	Residual	216.898	32	6.778		
	Total	289.886	34			

a. Dependent Variable: Total_Y

b. Predictors: (Constant), Total_X2, Total_X1

Sumber Data: Diolah Peneliti 2025

Berdasarkan hasil uji simultan yang telah dilakukan, dapat dilihat pada tabel tersebut menunjukkan bahwa hasil uji simultan variabel independen dengan variabel dependen. Dimana terlihat nilai F hitung (5.384) > nilai F tabel (3.295) dan nilai signifikan $0.010 < 0.05$. artinya variabel independen (Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat) secara simultan memiliki pengaruh dan signifikan terhadap variabel dependen Efektivitas Anggaran Desa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat memiliki pengaruh secara simultan terhadap Efektivitas Anggaran Desa maka (H_3) diterima.

c. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Metode pengujian ini digunakan untuk mengukur sejauh mana kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai R^2 berada diantara angka 0 dan 1. Nilai yang kecil menunjukkan kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen terbatas, maka nilai yang dihasilkan akan semakin baik apabila mendekati angka 1.

Tabel 4.17 Uji Koefisien Determinasi (Uji R^2)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.502 ^a	.252	.205	2.603
a. Predictors: (Constant), Total X2, Total X1				
b. Dependent Variable: Total Y				

Sumber Data: Diolah Peneliti 2025

Hasil pengujian koefisien determinasi diatas memperoleh nilai *Adjusted R Square* 0,205. Ini menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen (Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat) dalam penelitian ini mempengaruhi variabel dependen (Efektivitas Anggaran Desa) sebesar 20,5% sedangkan sisanya 79,5% dipengaruhi oleh variabel lain di luar variabel yang digunakan penelitian ini.

D. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pengaruh signifikan Akuntabilitas terhadap Efektivitas Anggaran Desa

Akuntabilitas adalah suatu bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media mempertanggungjawabkan yang dilaksanakan secara periodik.⁶⁷

Efektivitas anggaran desa merupakan ukuran sejauh mana anggaran yang direncanakan secara sistematis dan dinyatakan dalam bentuk kuantitatif baik dalam satuan uang, barang, maupun jasa dapat digunakan secara optimal untuk mencapai tujuan pembangunan desa.⁶⁸

Peneliti menganalisis hasil penelitian tentang pengaruh akuntabilitas dengan indikator akuntabilitas yaitu:

a. Adanya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dana desa

Adanya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dana desa yang merupakan salah satu indikator penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintah desa yang baik. Pengelolaan dana desa di desa mirring melibatkan masyarakat sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa tahapan pengelolaan dana desa melibatkan seluruh unsur masyarakat desa mirring.

b. Tercapainya tujuan dalam pengelolaan dana desa dalam satu tahun anggaran

Tercapainya tujuan dalam pengelolaan dana desa dalam satu tahun anggaran merupakan indikator penting yang mencerminkan efektivitas dan efisiensi penggunaan dana desa. Pengelolaan dana desa yang baik tidak hanya diukur dari seberapa besar anggaran yang terserap, tetapi lebih jauh dari sejauh mana program dan kegiatan yang

⁶⁷ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, 2018.

⁶⁸ "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1 Ayat (1)."

telah direncanakan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dapat dilaksanakan dengan tepat waktu, tepat sasaran, serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat desa.⁶⁹ Tujuan pembangunan yang direncanakan dalam APBDes belum sepenuhnya tercapai dalam tahun anggaran, seperti yang dilihat langsung oleh peneliti dimana masih banyak program yang belum terlaksana.

c. Adanya akses informasi laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa

Akses terhadap informasi laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa merupakan salah satu indikator utama dalam mewujudkan akuntabilitas tata kelola keuangan desa. Masyarakat sebagai pemilik kedaulatan tertinggi di desa memiliki hak untuk mengetahui bagaimana dana desa direncanakan, digunakan, dan dipertanggungjawabkan oleh pemerintah desa. Akses informasi laporan pengelolaan dana desa di desa mirring dapat mudah di akses dan dapat disajikan secara rinci, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara cepat dan tepat.

d. Adanya pengawasan oleh tim pelaksana

Pengawasan oleh tim pelaksana kegiatan merupakan komponen penting dalam memastikan bahwa pengelolaan dana desa berjalan sesuai dengan perencanaan, peraturan, dan prinsip tata kelola pemerintah yang baik. Tim pelaksana kegiatan (TPK) desa tidak hanya bertugas melaksanakan program pembangunan yang didanai dana desa, tetapi juga memiliki peran untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan secara langsung di lapangan.⁷⁰ Pengelolaan dana desa di desa mirring telah diawasi dengan baik oleh tim pelaksana.

⁶⁹ Fadillah Amin, *Keuangan Pemerintah Desa: Sumber Pendapatan, Alokasi Belanja, Dan APBDes* (Deepublish, 2023).

⁷⁰ Agus Suharyono, *Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa*, 2023.

Berdasarkan hasil perhitungan uji hipotesis secara parsial (Uji t) pada tabel didapatkan nilai signifikan variabel Akuntabilitas memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,408 bernilai positif dan memiliki nilai t hitung sebesar $2.918 > \text{nilai t tabel } 1.69389$ serta memiliki nilai signifikan sebesar $0,006 < 0,05$ yang berarti variabel akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap efektivitas anggaran desa yang ada pada Desa Mirring Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar sehingga hipotesis pertama (H_1) diterima.

Berdasarkan hasil penelitian yang Anda lakukan di Desa Mirring, Kecamatan Binuang, ditemukan bahwa akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap efektivitas anggaran desa. Temuan ini sejalan dengan teori akuntabilitas dan teori keagenan (agency theory) yang menjadi landasan penelitian. Dalam teori keagenan, pemerintah desa bertindak sebagai agen yang diberi mandat oleh masyarakat (principal) untuk mengelola dana desa. Tingkat akuntabilitas yang tinggi berarti agen secara aktif melaporkan, menyajikan, dan mempertanggungjawabkan pengelolaan anggaran kepada principal. Dengan demikian, informasi yang disampaikan secara transparan dan berkala kepada masyarakat berkontribusi langsung pada meningkatnya efektivitas pelaksanaan anggaran, karena masyarakat bisa memantau, mengevaluasi, dan memberikan masukan terhadap kegiatan yang dilakukan.

Temuan ini juga didukung oleh penelitian sebelumnya seperti oleh I Made Yoda & Ni Ketut Rasmini yang menyimpulkan bahwa akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana desa. Penelitian ini memperkuat keyakinan bahwa efektivitas anggaran desa akan tercapai apabila setiap tahap pengelolaan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan hingga pengawasan dilakukan secara bertanggung jawab. Akuntabilitas yang tinggi meminimalisir risiko penyalahgunaan

wewenang serta meningkatkan kepercayaan masyarakat, yang pada akhirnya memperlancar jalannya program dan kegiatan desa sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana pembangunan desa. Sebaliknya, jika akuntabilitas rendah, maka anggaran desa cenderung tidak efektif karena tidak mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara tepat dan optimal. Namun, berbeda dengan hasil penelitian Norhasanah yang menyatakan bahwa akuntabilitas tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi akuntabilitas dana desa semakin rendah pengelolaan dana desa.⁷¹

2. Pengaruh signifikan Partisipasi Masyarakat terhadap Efektivitas Anggaran Desa

Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan atau peran aktif individu maupun kelompok masyarakat dalam suatu kegiatan, terutama dalam proses pembangunan. Secara istilah, partisipasi mencakup keterlibatan dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga pemanfaatan hasil kegiatan pembangunan.⁷²

Efektivitas anggaran desa merupakan ukuran sejauh mana anggaran yang direncanakan secara sistematis dan dinyatakan dalam bentuk kuantitatif baik dalam satuan uang, barang, maupun jasa dapat digunakan secara optimal untuk mencapai tujuan pembangunan desa.⁷³

Peneliti menganalisis hasil penelitian tentang pengaruh partisipasi masyarakat dengan indikator partisipasi masyarakat yaitu:

- a. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pengelolaan dana desa

⁷¹ Nor Hasanah, "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Di Desa Sungai Kapitan, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat)" (2022).

⁷² N.d.Nyoman Sumaryadi, I Nyoman. Sosiologi Pemerintahan Dari Perspektif Pelayansn, *Sosiologi Pemerintahan Dari Perspektif Pelayanan*, 2010.

⁷³ "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1 Ayat (1)."

Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dana desa merupakan pondasi dari keberhasilan pembangunan desa. Semakin tinggi partisipasi masyarakat, maka semakin besar peluang program pembangunan akan tepat sasaran, berdaya guna, dan berkelanjutan.⁷⁴ Oleh karena itu, pemerintah desa harus terus mendorong budaya partisipatif yang sehat dan terbuka. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pengelolaan dana desa di desa mirring telah sesuai dan selalu terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan dana desa.

b. keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa

Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa adalah bagian paling penting dari pembangunan yang partisipatif dan berkelanjutan. Dengan adanya pelibatan langsung, pembangunan desa tidak hanya menjadi tanggungjawab pemerintah desa semata, tetapi menjadi kerja kolektif seluruh masyarakat. Hal ini akan memperkuat akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan keberhasilan program-program yang didanai oleh dana desa. Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa di desa mirring sendiri dimana masyarakat bersedia untuk berkontibusi memberikan sumbangan ide, keahlian, keterampilan, maupun tenaga untuk pelaksanaan program desa.

c. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dan penilaian hasil

Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dan penilaian hasil pengelolaan dana desa sangat penting untuk menciptakan pemerintah desa yang bersih, efektif, dan berpihak kepada masyarakat. Ketika masyarakat dilibatkan secara aktif dan diberi ruang untuk menyuarakan penilaian mereka, maka akan tercipta budaya pengelolaan yang transparan dan akuntabel, serta pembangunan desa yang benar-benar dirasakan

⁷⁴ Mudrajad Kuncoro, *Perencanaan Pembangunan Daerah: Teori Dan Aplikasi* (Gramedia Pustaka Utama, 2018).

manfaatnya oleh seluruh masyarakat. Masyarakat desa mirring sendiri telah terlibat dalam pengawasan dan penilaian hasil dari pengelolaan dana desa.

d. Keterlibatan masyarakat dalam penerimaan program dan pemanfaatan hasil

Keterlibatan masyarakat dalam penerimaan program dan pemanfaatan hasil merupakan indikator nyata bahwa pembangunan desa tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar menyentuh kehidupan masyarakat. Ketika masyarakat merasa memiliki dan memanfaatkan hasil program secara aktif, maka pembangunan desa akan berkelanjutan, bermanfaat jangka panjang, dan memberikan dampak sosial ekonomi yang luas. Di desa mirring sendiri masyarakat bersedia menjaga, melestarikan, dan mangaplikasikan hasil dari program yang dilaksanakan desa.

Berdasarkan hasil perhitungan uji hipotesis secara parsial (Uji t) pada tabel didapatkan nilai variabel Partisipasi Masyarakat (X2) menunjukkan nilai t-hitung sebesar 1,403 dan signifikansi $0,170 > 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap efektivitas anggaran desa.

Berdasarkan pengujian dari hasil analisis statistik (uji t), meskipun partisipasi masyarakat ada, secara statistik pengaruh langsungnya terhadap efektivitas anggaran desa di Desa Mirring tidak cukup kuat untuk dianggap signifikan. Ketidak signifikannya partisipasi masyarakat terhadap efektivitas anggaran desa dapat disebabkan oleh partisipasi yang hanya sebatas prosedural, minimnya kapasitas masyarakat, dan masih dominannya peran aparatur desa dalam pengambilan keputusan. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi belum dijalankan sebagai proses yang bermakna, melainkan hanya formalitas. Temuan ini bertentangan dengan asumsi dasar teori partisipatif yang menyatakan bahwa keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan,

pengawasan, dan evaluasi anggaran akan meningkatkan akuntabilitas, efisiensi, dan ketepatan sasaran dari program pembangunan desa. Dalam konteks teori keagenan, partisipasi masyarakat berperan sebagai mekanisme kontrol terhadap agen (pemerintah desa). Namun, jika partisipasi masyarakat bersifat pasif, tidak merata, atau hanya formalitas, maka fungsinya sebagai pengendali kinerja pemerintahan desa tidak berjalan efektif. Akibatnya, keterlibatan masyarakat tidak memberikan kontribusi yang berarti terhadap tercapainya efektivitas anggaran desa.

Ketidaksesuaian ini bisa disebabkan oleh rendahnya kualitas partisipasi masyarakat, seperti minimnya akses informasi, kurangnya pemahaman terhadap proses anggaran, atau lemahnya kapasitas masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan pengawasan. Dalam teori partisipasi, efektivitas baru bisa dicapai apabila partisipasi bersifat aktif, sukarela, dan dilandasi oleh kesadaran serta rasa memiliki terhadap proses pembangunan. Oleh karena itu, meskipun masyarakat dilibatkan secara administratif, jika tidak terjadi interaksi substantif antara masyarakat dan aparat desa, maka dampaknya terhadap efektivitas anggaran desa akan minim.

Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Defi Purnamawati Saragih dkk, yang berjudul *Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Tata Kelola Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dengan Akuntabilitas Sebagai Intervening*, menyatakan bahwa partisipasi masyarakat tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, karena partisipasi masyarakat yang tidak dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.⁷⁵

⁷⁵ M. Firza Alpi Defi Purnamawati Saragih, “Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Tata Kelola Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dengan Akuntabilitas Sebagai Intervening” 5 (2023): 1–10.

Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nor Hasanah yang berjudul Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa (di Desa Sungai Kapitan, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat), menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan desa akan mendorong hubungan yang positif antara masyarakat desa dengan pemerintah desa, hal ini akan menjadikan pemerintah desa lebih sering berbaur dan berinteraksi dengan masyarakat.⁷⁶

3. Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat berpengaruh secara simultan terhadap Efektivitas Anggaran Desa

Akuntabilitas adalah suatu bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media mempertanggungjawabkan yang dilaksanakan secara periodik.⁷⁷

Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan atau peran aktif individu maupun kelompok masyarakat dalam suatu kegiatan, terutama dalam proses pembangunan. Secara istilah, partisipasi mencakup keterlibatan dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga pemanfaatan hasil kegiatan pembangunan.⁷⁸

Efektivitas anggaran desa merupakan ukuran sejauh mana anggaran yang direncanakan secara sistematis dan dinyatakan dalam bentuk kuantitatif baik dalam satuan uang, barang, maupun jasa dapat digunakan secara optimal untuk mencapai tujuan pembangunan desa.⁷⁹

⁷⁶ Nor Hasanah, "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Di Desa Sungai Kapitan, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat)."

⁷⁷ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, 2018.

⁷⁸ Sumaryadi, I Nyoman. Sosiologi Pemerintahan Dari Perspektif Pelayanan, *Sosiologi Pemerintahan Dari Perspektif Pelayanan*.

⁷⁹ "Undang-Undang Nomor 6 Pasal 1 Ayat 1 Tahun 2014 Tentang Desa."

Peneliti menganalisis hasil penelitian tentang pengaruh akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dengan indikator efektivitas anggaran desa yaitu:

a. kesesuaian dengan rencana pembangunan

kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan dengan rencana pembangunan desa merupakan indikator utama dalam menilai keberhasilan pengelolaan dana desa. Rencana pembangunan desa disusun secara partisipatif melalui musyawarah desa (Musdes) dan tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) yang kemudian dijabarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).⁸⁰ Rencana pembangunan di desa mirroring yang dimana anggaran desa telah digunakan sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah desa dan rencana kerja pemerintah desa.

b. Capaian program dan kegiatan

Capaian program dan kegiatan dalam menilai keberhasilan penggunaan anggaran desa dalam satu tahun anggaran. Capaian ini mencerminkan sejauh mana pemerintah desa mampu merealisasikan program-program yang telah direncanakan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Capaian program dan kegiatan yang ada di desa mirroring belum sepenuhnya tercapai dan terlaksana. Hal ini, tidak sejalan dengan penyataan tentang program yang dibiayai anggaran desa telah mencapai target yang telah direncanakan.

c. Tingkat kepuasan masyarakat

Tingkat kepuasan masyarakat merupakan ukuran subjektif yang menunjukkan sejauh mana masyarakat merasa puas terhadap hasil pengelolaan dana desa, baik dari segi pelayanan, pelaksanaan program, maupun dampaknya terhadap kehidupan

⁸⁰ Hariawan Bihamding, *Perencanaan Pembangunan Partisipatif Desa* (Yogyakarta: Deepublish, 2019).

mereka.⁸¹ Kepuasan masyarakat menjadi cerminan dari efektivitas, efisiensi, transparasi, dan akuntabilitas pemerintah desa dalam menjalankan tugasnya. Namun, tingkat kepuasan masyarakat di desa mirroring sendiri masih banyak yang belum merasa puas karena masih ada beberapa program kerja dari pemerintah belum terlaksana dengan baik. Hal ini juga tidak sejalan dengan pernyataan tentang masyarakat merasa puas dengan hasil pembangunan yang dibiayai oleh anggaran desa.

d. Ketepatan waktu dan realisasi anggaran

Ketepatan waktu dan realisasi anggaran yang tepat sasaran menjadi tanda bahwa pengelolaan dana desa telah berjalan secara profesional dan bertanggungjawab. Ketepatan waktu dan realisasi anggaran di desa mirroring sendiri sudah berjalan sesuai dengan pernyataan bahwa anggaran desa direalisasikan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

e. Efisiensi dan Transparansi

Efisiensi dan transparansi merupakan dua prinsip utama dalam tata kelola keuangan yang baik, termasuk dalam konteks pengelolaan dana desa.⁸² Keduanya saling berkaitan dan sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan program pembangunan desa yang bersumber dari dana desa. Efisiensi dan teransparansi pengelolaan dana desa di desa mirroring sendiri dimana anggaran desa dikelola tanpa pemborosan dalam pelaksanaanya dan dengan keterbukaan kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil uji simultan (Uji F) menunjukkan nilai F-hitung sebesar 5,384 dengan signifikansi $0,010 < 0,05$, yang berarti bahwa secara simultan

⁸¹ Faisal Amin, *Keuangan Pemerintah Desa: Sumber Pendapatan, Alokasi Belanja, Dan APBDes* (Yogyakarta: Deepublish, 2023).

⁸² A. Suharyono, *Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa* (Yogyakarta: Lakeisha, 2023).

akuntabilitas dan partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap efektivitas anggaran desa.

Meskipun partisipasi masyarakat tidak signifikan secara parsial, namun bersama-sama dengan akuntabilitas, keduanya memberikan kontribusi terhadap efektivitas penggunaan dana desa. Hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa baik akuntabilitas maupun partisipasi masyarakat secara simultan berpengaruh signifikan terhadap efektivitas anggaran desa di Desa Mirring, Kecamatan Binuang. Temuan ini selaras dengan teori keagenan (agency theory), yang menjelaskan hubungan antara masyarakat (principal) dan pemerintah desa (agen) dalam konteks pengelolaan keuangan publik. Ketika pemerintah desa bertindak akuntabel dengan menyampaikan laporan, membuka akses informasi, dan melibatkan masyarakat dalam pengawasan, maka hubungan keagenan menjadi lebih seimbang karena asimetri informasi dapat diminimalisir. Di saat yang sama, partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan hingga evaluasi anggaran memungkinkan program desa berjalan lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat, sehingga efektivitas penggunaan anggaran pun meningkat.

Teori keagenan menekankan pentingnya mekanisme kontrol untuk menghindari penyimpangan dalam pengelolaan keuangan, dan dalam konteks desa, kontrol tersebut diwujudkan melalui akuntabilitas aparat desa dan partisipasi masyarakat. Hasil penelitian ini memperkuat pandangan tersebut karena akuntabilitas memungkinkan masyarakat mendapatkan informasi yang jujur dan transparan, sementara partisipasi masyarakat memastikan anggaran desa diarahkan pada prioritas yang riil. Ketika kedua faktor ini berjalan bersama, maka efektivitas anggaran desa dapat tercapai secara optimal. Hal ini juga sejalan dengan prinsip good governance yang menekankan

akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi sebagai fondasi tata kelola pemerintahan yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait Pengaruh Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Efektivitas Anggaran Desa Pada Desa Mirring Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap efektivitas anggaran desa di desa mirring. Artinya, semakin tinggi akuntabilitas aparat desa dalam hal keterbukaan, pelaporan, dan tanggung jawab atas penggunaan dana desa maka efektivitas penggunaan anggaran desa juga meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas merupakan faktor penting dalam mewujudkan tata kelola anggaran yang baik dan tepat sasaran.
2. Partisipasi Masyarakat tidak berpengaruh secara signifikan terhadap efektivitas anggaran desa di desa mirring. Meski masyarakat ikut serta dalam beberapa tahapan perencanaan atau pelaksanaan, namun tingkat partisipasi tersebut belum cukup kuat atau bermakna untuk memengaruhi efektivitas penggunaan anggaran secara keseluruhan. Bisa jadi karena partisipasi hanya bersifat formalitas atau keterlibatan masyarakat belum optimal dalam proses pengambilan keputusan. Meskipun partisipasi masyarakat merupakan aspek penting dalam tata kelola anggaran desa, dalam konteks penelitian ini keterlibatan masyarakat belum mampu memberikan dampak yang berarti terhadap efektivitas anggaran. Hal ini dapat disebabkan oleh rendahnya

kualitas partisipasi yang cenderung bersifat simbolis atau terbatas pada tingkat pelaksanaan saja.

3. Akuntabilitas dan partisipasi masyarakat secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap efektivitas anggaran desa di desa mirring. Ketika digabungkan, kedua variabel ini memberikan kontribusi yang berarti terhadap efektivitas pengelolaan anggaran. Ini menandakan bahwa perbaikan dalam kedua aspek tersebut terutama peningkatan peran serta masyarakat secara lebih aktif dan substansial dapat mendukung anggaran desa yang lebih tepat guna dan berdampak bagi masyarakat. Artinya, kombinasi dari akuntabilitas yang baik dan partisipasi masyarakat yang aktif secara bersama-sama mampu meningkatkan efektivitas anggaran desa. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah desa yang transparan dan akuntabel dengan masyarakat yang berperan aktif dalam setiap tahapan pengelolaan anggaran.

B. Saran

Berdasarkan hasil interpretasi atau simpulan yang telah dilakukan maka penulis memiliki saran yaitu:

1. Bagi Pemerintah Desa

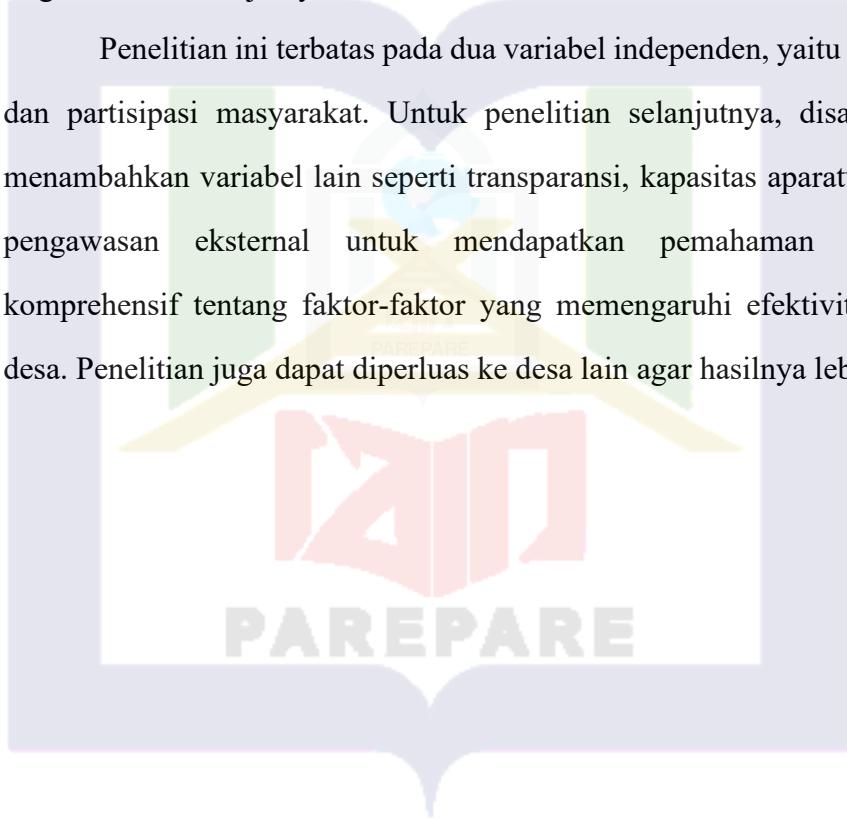
Pemerintah Desa Mirring diharapkan dapat terus meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran desa, terutama dalam hal pelaporan dan pertanggungjawaban yang terbuka serta mudah diakses oleh masyarakat. Pelaksanaan perencanaan, pelaporan, dan pengawasan sebaiknya melibatkan berbagai unsur masyarakat agar tercipta kepercayaan publik yang tinggi. Selain itu, sistem informasi desa dapat dimaksimalkan untuk menyampaikan informasi anggaran secara transparan dan real time.

2. Bagi Masyarakat

Masyarakat Desa Mirring diharapkan lebih aktif berpartisipasi dalam setiap tahapan pengelolaan anggaran desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan. Keterlibatan ini penting untuk memastikan bahwa program pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Diperlukan peningkatan kesadaran kolektif tentang hak dan tanggung jawab dalam proses pembangunan desa.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini terbatas pada dua variabel independen, yaitu akuntabilitas dan partisipasi masyarakat. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar menambahkan variabel lain seperti transparansi, kapasitas aparatur desa, atau pengawasan eksternal untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas anggaran desa. Penelitian juga dapat diperluas ke desa lain agar hasilnya lebih general.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Al-Karim

Adi, Isbandi Rukminto. *Pemberdayaan Masyarakat: Konsep Dan Aplikasi*. Jakarta: LP3ES, 2003.

Adisasmita, Rahardjo. *Manajemen Pemerintah Daerah*. Universitas Hasanuddin: Pusat Pengembangan Keuangan dan Ekonomi Daerah, 2009.

Adolph, Ralph. "Urgensi Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Kebijakan Dan Perencanaan Anggaran," 2016.

Amin, Fadillah. *Keuangan Pemerintah Desa: Sumber Pendapatan, Alokasi Belanja, Dan APBDes*. Deepublish, 2023.

Amin, Faisal. *Keuangan Pemerintah Desa: Sumber Pendapatan, Alokasi Belanja, Dan APBDes*. Yogyakarta: Deepublish, 2023.

Ansofino, Julianis, and H Yolamalinda & Arfilindo. *Buku Ajar Ekonometrika*. Yogyakarta: Deepublish, 2016.

Ardiyos. *Kamus Besar Akuntansi*. Jakarta: Citra Harta Prima, 2016.

Arina, Ade Irma Seska, Vecky A J Masinambow, and Een N Walewangko. "Pengaruh Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa Terhadap Indeks Desa Membangun Di Kabupaten Minahasa Tenggara." *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah* 22, no. 3 (2021).

Arodhiskara, Yadi, and Zulkarnain. "Analisis Efektifitas Dan Efisiensi Retribusi Pedagang Kaki Lima Di Kota Parepare." *Jurnal Ekonomi Pembangunan STIE Muhammadiyah Palopo* 3, no. 2 (2017).

Balaka, Muh Yani. "Metodologi Penelitian Kuantitatif," 2022.

Bihamding, Hariawan. *Perencanaan Pembangunan Partisipatif Desa*. Yogyakarta: Deepublish, 2019.

Defi Purnamawati Saragih, M. Firza Alpi. "Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Tata Kelola Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dengan Akuntabilitas Sebagai Intervening" 5 (2023).

Drs. Harianto, M.Si, M.Si Mudji Rahardjo, SH, and M.Si Drs. Bambang Martin Baru. *Pengelolaan Dana Desa Dan Tindak Pidana Korupsi (Konsep, Aplikasi, Dan Implementasinya)*. Edited by Drs. Agus Wiyaka. M.Si. Surabaya: UD. Dalle Nurul Utama Wisma Permai Tengah, 2023.

- Fadhilah, Difa Sari Astantri, Hardi Utomo, and Budi Riyanti. "Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat Dan Kebijakan Desa." *ProBank* 9, no. 2 (2024).
- Fajri, Ridha, and Julita Julita. "Pengaruh Transparansi, Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Aparatur Desa, Dan Pemahaman Regulasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa." *Jurnal Al-Iqtishad* 17, no. 2 (2021).
- Frihatni, Andi Ayu, Nirwana Nirwana, and Syamsuddin Syamsuddin. "Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dalam Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kota Parepare." *Economos : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 4, no. 3 (2021).
- Ghosali, Imam. *Applikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS* 25, 2018.
- Hasibuan, Siti Kholizah. "Pengaruh Kompetensi Aparat Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Kecamatan Tambusai Utara." *Journals of Indonesian Multidisciplinary Research* 1, no. 1 (2022).
- Hayat. *Buku Kebijakan Publik*. Intrans Publishing, 2018.
- Hos, Jamaluddin, and Muhammad Basri. "Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Tetehaka) Kecamatan Puriala Kabupaten Konawe" 15, no. 2 (2024).
- Huraerah, Abu. *Pengorganisasian Dan Pengembangan Masyarakat: Model Dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan*. Bandung: Humaniora, 2008.
- Iskandar, A Halim. *SDGs Desa: Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020.
- James L. Gibson, John M. Ivancevich, James H. Donnelly. *Organizations: Behavior, Structure, Processes*. 9th ed. Irwin, 1997, n.d.
- Kuncoro, Mudrajad. *Perencanaan Pembangunan Daerah: Teori Dan Aplikasi*. Gramedia Pustaka Utama, 2018.
- Kurnianingrum, Farida. "Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2021." *Ditjen Bina Pemerintah Desa*, 2021.
- Mahmudi. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2019.
- Making, Andreani Avelyni Leda, and Nur Handayani. "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dana Desa." *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)* 10, no. 10 (2021).
- Malumperas, Michael H J, Hendrik Manossoh, and Sonny Pangerapan. "Akuntabilitas

- Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Di Desa Bowongkali, Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara).” *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 9, no. 1 (2021).
- Mamuaja, Jovanka, Freddy Semuel Kawatu, and Anita Kambey. “Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa: Di Desa Sea Satu Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa.” *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 2021.
- Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi, 2009.
- Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik*. Edited by Mardiasmo. I. Yogyakarta: Andi, 2018.
- Mardiasmo. *AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - Edisi Terbaru*. Andi, 2021.
- Mendagri. “Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2013).
- Muhrayani. “Pengaruh Kompetensi Perangkat Desa, Komitmen Organisasi, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.” Universitas Hasanuddin, 2021.
- Munandar, M. *Anggaran Perusahaan*. BPFE Yogyakarta, 2001.
- Nafarin, M. *Penganggaran Perusahaan*. Jakarta: Salemba Empat, 2007.
- Nor Hasanah. “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Di Desa Sungai Kapitan, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat),” 2022.
- Norhasanah. “Pengaruh Akuntabilitas,Transparansi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Di Desa Sungai Kapitan, Kecamatan Kumai,Kabupaten Kotawaringin Barat).” Universitas Isla Negeri Walisongo, 2022.
- Nur, Sri Wahyuni. “Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Tellumpanuae Kabupaten Maros.” *Um Jember Press*, 2021.
- Nur, Wahyuni Sri, and Fitri. “Peningkatan Transparansi, Akuntabilitas, Dan Partisipatif Melalui Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Tellumpanuae Kabupaten Maros.” *Jurnal Dedikasi Masyarakat* 3, no. 1 (2019).
- Permendesa. “Permendesa Nomor 19 Tahun 2017.” *Permendesa Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018*, 2017.
- Ravianto, J. *Produktivitas Dan Pengukuran*. Jakarta: Bina Aksara, 2014.
- Sahara, Ira. “Analisis Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Pelaksanaan Program

- Kerja Di Dinas Pekerjaan Umum Kota Parepare.” *Economos: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 3 (2020).
- Sakdiyah, Lisa Robiatu. “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat, Dan Sistem Keuangan Desa Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa Se-Kecamatan Bangsri).” Universitas Tidar, 2022.
- Saputra, Zulfan. “Pengaruh Akuntabilitas Transparansi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Lieue Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar.” Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2023.
- Sari, Cindi Pradipta. “Pengaruh Efektivitas, Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa Di Desa Tanjungrejo Kecamatan Wuluhan.” Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mandala Jember, 2021.
- Setyawati, Eka Sri. “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat, Pengelolaan Dan Alokasi Dana Desa (Add) Terhadap Pemberdayaan Masyarakat.” Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022.
- Setyawati. “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat, Pengelolaan Dan Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Pada Kecamatan Reban Kabupaten Batang).” Universitas Islam Sultan Agung, 2022.
- Sina, Alfian Ibnu. *Implementasi Transparansi Dan Akuntabilitas Sebagai Upaya Pencegahan Korupsi (Studi Pada DPC PKB Di Ngawi)*. Surakarta: Febi IAIN Surakarta, 2017.
- Siti Irene Astuti Dwiningrum. *Desentralisasi Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Solekhan, Moch. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa: Berbasis Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Mekanisme Akuntabilitas*. Setara, 2012.
- Solihah, Faizzatus, Biana Adha Inappy, and Adhitya Bayu Suryantara. “Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dan Peran Perangkat Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Empiris Pada Desa Se-Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur).” *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi* 2, no. 1 (2022).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D*. Cetakan Ke. Bandung: Alfabeta, 2020.

Suharyono, A. *Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa*. Yogyakarta: Lakeisha, 2023.

Suharyono, Agus. *Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa*, 2023.

Sumampow, Monique. *Perencanaan Darat-Laut Yang Terintegrasi Dengan Menggunakan Informasi Spasial Yang Partisipatif*. Jakarta: Pradya Paramita, 2004.

Sumaryadi, I Nyoman. Sosiologi Pemerintahan Dari Perspektif Pelayansn, N.d.Nyoman. *Sosiologi Pemerintahan Dari Perspektif Pelayanan*, 2010.

Sumaryadi, I Nyoman. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom Dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Citra Utama, 2010.

Sumaryadi. *Sosiologi Pemerintahan*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

“Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.,” n.d.

“Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.,” n.d.

“Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Pemerimbangan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Daerah.,” n.d.

“Undang-Undang Nomor 6 Pasal 1 Ayat 1 Tahun 2014 Tentang Desa.,” n.d.

“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1 Ayat (1),” n.d.

“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,” n.d.

Widyaningrum, Iin. “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Klaten.” Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023.





NAMA MAHASISWA : ARMA

NIM : 2120203862202015

FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

PROGRAM STUDI : AKUNTANSI SYARIAH

JUDUL :PENGARUH AKUNTABILITAS DAN PARTISIPASI
MASYARAKAT TERHADAP EFEKTIVITAS
ANGGARAN DESA PADA DESA MIRRING
KECAMATAN BINUANG KABUPATEN POLEWALI
MANDAR

KUESIONER PENELITIAN

Assalamualaikum Wr.Wb.

Dengan Hormat,

Berkenan dengan pelaksanaan dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul “PENGARUH AKUNTABILITAS DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP EFEKTIVITAS ANGGARAN DESA PADA DESA MIRRING KECAMATAN BINUANG KABUPATEN POLEWALI MANDAR” maka saya memohon kesediaan saudara/i untuk mengisi kuesioner penelitian ini dengan penilaian secara objektif. Data dari saudara/i akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan akademis penelitian semata. Atas kesediaan dan partisipasinya dalam mengisi kuesioner ini, kami ucapan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Hormat saya,

I. IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama :
2. Umur :
3. Jenis Kelamin :
4. Pekerjaan :

II. PETUNJUK PENGISIAN

1. Pertanyaan yang ada mohon dibaca dan dipahami dengan sebaik-baiknya, sehingga tidak ada pernyataan yang tidak terisi atau terlewat.
2. Berilah tanda ceklis pada jawaban yang saudara/i pada kolom yang telah disediakan. Pilihlah jawaban yang sesuai pendapat atas pertanyaan, dengan keterangan dibawah ini

SS : Sangat Setuju = 5

S : Setuju = 4

KS : Kurang Setuju = 3

TS : Tidak Setuju = 2

STS : Sangat Tidak Setuju = 1

3. Setiap pertanyaan hanya membutuhkan satu jawaban saja.
4. Terimakasih atas paertisipasinya.

III. DAFTAR PERNYATAAN BESERTA ALTERNATIF JAWABAN

No.	Pernyataan	Jawaban				
		SS (5)	S (4)	KS (3)	TS (2)	STS (1)
Akuntabilitas						
1	Tahapan pengelolaan dana desa melibatkan seluruh unsur masyarakat.					
2	Tujuan pembangunan yang yang direncanakan dalam APBDes telah tercapai dalam tahun anggaran berjalan.					
3	Pengelolaan dana desa dapat mudah di akses dan dapat di sajikan secara rinci, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan secara cepat dan tepat.					
4	Saya merasa pengelolaan dana desa telah diawasi dengan baik oleh tim pelaksana.					

5	Menurut saya akuntabilitas sangat diperlukan dalam peningkatan kinerja dari pemerintah desa.				
Partisipasi Masyarakat					
1	Saya merasa masyarakat desa Mirring selalu terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan dana desa.				
2	Saya merasa masyarakat desa Mirring bersedia untuk berkontribusi memberikan sumbangan ide, keahlian, keterampilan, maupun tenaga untuk pelaksanaan program desa.				
3	Saya merasa masyarakat desa Mirring bebas dalam menyampaikan aspirasi saran serta kritikan kepada pengelolaan dana desa.				
4	Saya merasa masyarakat desa mirring terlibat dalam pengawasan dan penilaian hasil dari pengelolaan dana desa.				
5	Saya bersedia menjaga, melestarikan dan mengaplikasikan hasil dari program yang dilaksanakan desa.				
Efektivitas Anggaran Desa					
1	Anggaran Desa telah digunakan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.				
2	Program yang dibiayai anggaran desa telah mencapai target yang telah direncanakan.				
3	Masyarakat merasa puas dengan hasil pembangunan yang dibiayai oleh anggaran desa.				

4	Anggaran desa direalisasikan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.				
5	Anggaran desa dikelola tanpa pemborosan dalam pelaksanaanya dan dengan keterbukaan kepada masyarakat.				



DESKRIPSI JAWABAN RESPONDEN

Rekapitulasi Jawaban Responden Variabel Akuntabilitas (X1)

No.	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	Total
1	4	4	4	4	4	20
2	4	4	4	3	5	20
3	4	4	4	4	5	21
4	5	5	5	4	5	24
5	4	5	4	5	3	21
6	5	5	5	4	5	24
7	5	5	5	3	5	23
8	5	5	5	4	4	23
9	5	5	5	5	5	25
10	5	5	5	5	5	25
11	5	5	5	5	5	25
12	5	5	5	5	4	24
13	5	5	5	5	5	25
14	4	4	4	5	4	21
15	5	5	5	4	4	23
16	4	4	4	5	4	21
17	5	5	5	5	3	23
18	4	4	4	5	4	21
19	2	4	2	4	5	17
20	4	4	4	5	4	21
21	1	4	1	1	1	8
22	5	5	5	4	4	23
23	5	5	5	5	5	25
24	5	5	5	5	1	21
25	5	5	5	5	5	25
26	5	5	5	5	4	24
27	5	5	5	5	1	21
28	4	4	4	5	4	21
29	5	5	5	4	4	23
30	4	4	4	5	4	21
31	5	5	5	5	3	23
32	4	4	4	5	4	21
33	2	4	2	4	5	17
34	4	4	4	5	4	21
35	5	5	5	4	5	24

Rekapitulasi Jawaban Responden Variabel Partisipasi Masyarakat (X2)

No.	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	Total
1	4	5	4	5	4	22
2	4	5	5	5	5	24
3	5	5	5	5	5	25
4	5	4	4	4	4	21
5	5	4	5	4	2	20
6	5	5	5	5	5	25
7	4	5	5	5	5	24
8	4	5	5	5	4	23
9	4	4	4	4	4	20
10	4	4	4	4	4	20
11	5	5	5	5	5	25
12	4	5	5	5	4	23
13	4	4	4	4	4	20
14	5	5	4	5	5	24
15	5	4	4	5	3	21
16	5	4	4	4	4	21
17	4	5	3	3	5	20
18	5	5	4	3	5	22
19	4	4	3	4	4	19
20	5	4	5	3	3	20
21	4	5	5	5	4	23
22	4	4	4	4	4	20
23	4	4	4	4	4	20
24	5	5	5	5	5	25
25	4	5	5	5	4	23
26	4	4	4	4	4	20
27	5	5	4	5	5	24
28	5	4	4	5	3	21
29	5	4	4	4	4	21
30	5	5	3	3	5	21
31	5	5	4	3	5	22
32	4	4	3	4	4	19
33	4	4	5	3	3	19
34	4	4	4	4	2	18
35	5	5	5	5	5	25

Rekapitulasi Jawaban Responden Efektivitas Anggaran Desa (Y)

No.	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Total
1	4	4	4	4	4	20
2	1	4	3	3	3	14
3	5	4	4	4	5	22
4	4	4	4	4	5	21
5	5	4	2	4	5	20
6	5	4	4	4	5	22
7	3	3	3	5	3	17
8	5	5	4	4	5	23
9	5	4	4	4	4	21
10	5	4	4	4	4	21
11	5	5	5	5	5	25
12	5	5	4	4	5	23
13	5	4	4	4	4	21
14	5	5	5	5	5	25
15	4	4	3	4	5	20
16	4	5	5	5	5	24
17	5	5	5	4	5	24
18	4	4	3	4	3	18
19	3	3	4	4	4	18
20	3	1	4	4	4	16
21	3	3	3	5	3	17
22	5	5	4	4	5	23
23	5	4	4	4	4	21
24	5	4	4	4	4	21
25	5	5	5	5	5	25
26	5	5	4	4	5	23
27	5	4	4	4	4	21
28	5	5	5	5	5	25
29	4	4	3	4	5	20
30	4	5	5	5	5	24
31	5	5	5	4	5	24
32	4	4	3	4	3	18
33	3	3	4	4	4	18
34	3	1	4	4	4	16
35	5	4	4	4	5	22

HASIL SPSS

Karakteristik Responden Berdasarkan Umur

Usia

Umur					
	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent	
Valid	20-30	12	34,3	34,3	34,3
	30-40	12	34,3	34,3	68,6
	40-50	4	11,4	11,4	80,0
	50-60	7	20,0	20,0	100,0
	Total	35	100,0	100,0	

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin

Jenis_Kelamin					
	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent	
Valid	Laki Laki	20	57,1	57,1	57,1
	Perempuan	15	42,9	42,9	100,0
	Total	35	100,0	100,0	

Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan

Pekerjaan

Pekerjaan					
	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent	
Valid	Aparat Desa	10	28,6	28,6	28,6
	Guru	5	14,3	14,3	42,9
	Kader Posyandu	3	8,6	8,6	51,4
	Tokoh Masyarakat	4	11,4	11,4	62,9
	Petani	6	17,1	17,1	80,0
	IRT	7	20,0	20,0	100,0
	Total	35	100,0	100,0	

Distribusi Jawaban Responden Untuk Variabel Akuntabilitas (X1)
Uji Validitas (X1)

Correlations

		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	Total_X1
X1.1	Pearson Correlation	1	.742**	1.000**	.499**	.167	.918**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.002	.339	.000
	N	35	35	35	35	35	35
X1.2	Pearson Correlation	.742**	1	.742**	.167	-.010	.649**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.339	.953	.000
	N	35	35	35	35	35	35
X1.3	Pearson Correlation	1.000**	.742**	1	.499**	.167	.918**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.002	.339	.000
	N	35	35	35	35	35	35
X1.4	Pearson Correlation	.499**	.167	.499**	1	.094	.630**
	Sig. (2-tailed)	.002	.339	.002		.592	.000
	N	35	35	35	35	35	35
X1.5	Pearson Correlation	.167	-.010	.167	.094	1	.481**
	Sig. (2-tailed)	.339	.953	.339	.592		.003
	N	35	35	35	35	35	35
Total_X1	Pearson Correlation	.918**	.649**	.918**	.630**	.481**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.003	
	N	35	35	35	35	35	35

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Distribusi Jawaban Responden Untuk Variabel Partisipasi Masyarakat (X2)

Uji Validitas (X2)

Correlations

		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	Total_X2
X2.1	Pearson Correlation	1	.144	.099	.011	.176	.386*
	Sig. (2-tailed)		.410	.570	.950	.311	.022
	N	35	35	35	35	35	35
X2.2	Pearson Correlation	.144	1	.335*	.375*	.716**	.813**
	Sig. (2-tailed)	.410		.049	.026	.000	.000
	N	35	35	35	35	35	35
X2.3	Pearson Correlation	.099	.335*	1	.478**	-.022	.590**
	Sig. (2-tailed)	.570	.049		.004	.899	.000
	N	35	35	35	35	35	35
X2.4	Pearson Correlation	.011	.375*	.478**	1	.166	.676**
	Sig. (2-tailed)	.950	.026	.004		.342	.000
	N	35	35	35	35	35	35
X2.5	Pearson Correlation	.176	.716**	-.022	.166	1	.676**
	Sig. (2-tailed)	.311	.000	.899	.342		.000
	N	35	35	35	35	35	35
Total_X2	Pearson Correlation	.386*	.813**	.590**	.676**	.676**	1
	Sig. (2-tailed)	.022	.000	.000	.000	.000	
	N	35	35	35	35	35	35

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Distribusi Jawaban Responden Untuk Variabel Efektivitas Anggaran Desa (Y)

Uji Validitas (Y)

		Correlations					
		Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Total_Y
Y.1	Pearson Correlation	1	.593**	.381*	.181	.606**	.812**
	Sig. (2-tailed)		.000	.024	.299	.000	.000
	N	35	35	35	35	35	35
Y.2	Pearson Correlation	.593**	1	.397*	.224	.529**	.808**
	Sig. (2-tailed)	.000		.018	.195	.001	.000
	N	35	35	35	35	35	35
Y.3	Pearson Correlation	.381*	.397*	1	.433**	.503**	.714**
	Sig. (2-tailed)	.024	.018		.009	.002	.000
	N	35	35	35	35	35	35
Y.4	Pearson Correlation	.181	.224	.433**	1	.186	.456**
	Sig. (2-tailed)	.299	.195	.009		.285	.006
	N	35	35	35	35	35	35
Y.5	Pearson Correlation	.606**	.529**	.503**	.186	1	.791**
	Sig. (2-tailed)	.000	.001	.002	.285		.000
	N	35	35	35	35	35	35
Total_Y	Pearson Correlation	.812**	.808**	.714**	.456**	.791**	1

Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.006	.000	
N	35	35	35	35	35	35

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.740	5

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.604	5

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.774	5

Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardized Residual

N		35
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.52573714
Most Extreme Differences	Absolute	.147
	Positive	.112
	Negative	-.147
Test Statistic		.147
Asymp. Sig. (2-tailed)		.054 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

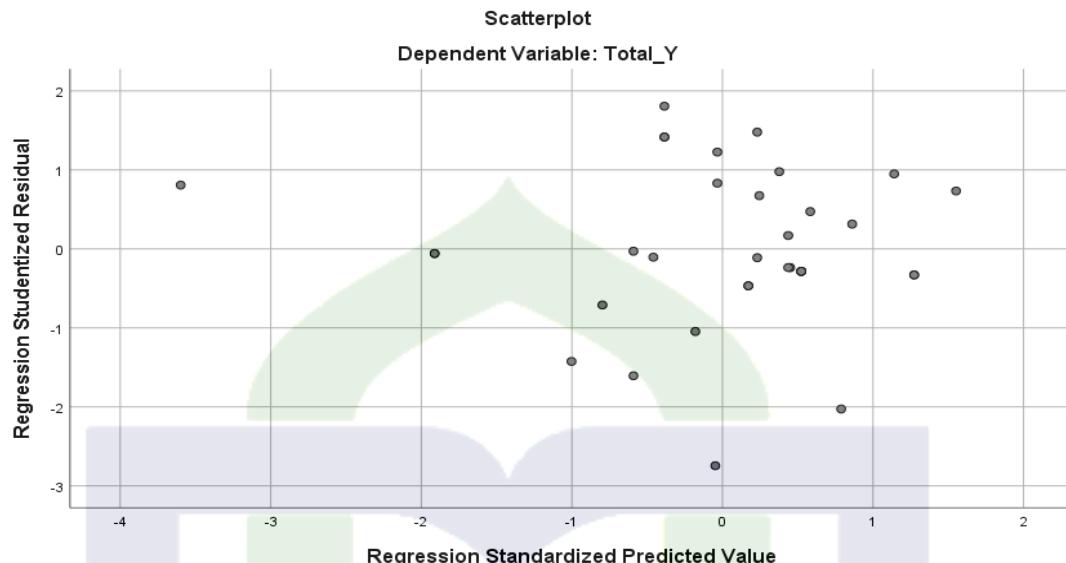
Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Collinearity Statistics		
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1(Constant)	5.473	5.508		.994	.328		
Total_X1	.408	.140	.446	2.918	.006	.999	1.001
Total_X2	.301	.215	.215	1.403	.170	.999	1.001

a. Dependent Variable: Total_Y

Uji Heteroskedastisitas



Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Collinearity Statistics		
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1(Constant)	5.473	5.508		.994	.328		
Total_X1	.408	.140	.446	2.918	.006	.999	1.001
Total_X2	.301	.215	.215	1.403	.170	.999	1.001

a. Dependent Variable: Total_Y

Uji T**Coefficients^a**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1(Constant)	5.473	5.508			.994	.328
Total_X1	.408	.140	.446		2.918	.006
Total_X2	.301	.215	.215		1.403	.170

a. Dependent Variable: Total_Y

Uji F**ANOVA^a**

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	72.988	2	36.494	5.384	.010 ^b
Residual	216.898	32	6.778		
Total	289.886	34			

a. Dependent Variable: Total_Y

b. Predictors: (Constant), Total_X2, Total_X1

Uji Koefisien Determinasi (R²)**Model Summary^b**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.502 ^a	.252	.205	2.603

a. Predictors: (Constant), Total_X2, Total_X1

b. Dependent Variable: Total_Y



DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
NOMOR : B-4138/ln.39/FEBI.04/PP.00.9/08/2024

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI/TUGAS AKHIR MAHASISWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAEREPARE

- Menimbang a. Bawa untuk menjamin kualitas skripsi/tugas akhir mahasiswa FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN Parepare, maka dipandang perlu penetapan pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa tahun 2024
- b. Bawa yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diberi tugas sebagai pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa.
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah RI Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Parepare;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor: 394 Tahun 2003 tentang Pembukaan Program Studi;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Parepare
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Parepare.
- Memperhatikan : a. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor: SP DIPA-025.04.2..307381/2024, tanggal 24 November 2023 tentang DIPA IAIN Parepare Tahun Anggaran 2024
- b. Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare Nomor: 361 Tahun 2024 Tahun 2024, tanggal 21 Februari 2024 tentang pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam;
- MEMUTUSKAN
- Menetapkan : a. Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tentang pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare Tahun 2024
- b. Menunjuk saudara: **Abdul Hamid, S.E., M.M**, sebagai pembimbing skripsi/tugas akhir bagi mahasiswa :
- Nama Mahasiswa : ARMA
- NIM : 2120203862202015
- Program Studi : Akuntansi Syari'ah
- Judul Penelitian : PENGARUH AKUNTABILITAS DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP EFektifitas ANGGARAN DESA PADA KEC. BINUANG KAB. POLMAN
- c. Tugas pembimbing adalah membimbing dan mengarahkan mahasiswa mulai pada penyusunan sinopsis sampai selesai sebuah karya ilmiah yang berkualitas dalam bentuk skripsi/tugas akhir;
- d. Segala biaya akibat diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran belanja IAIN Parepare;
- e. Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Parepare
Pada tanggal 12 Agustus 2024

Dekan.



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP 197102082001122002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404

PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

**BERITA ACARA
REVISI JUDUL SKRIPSI**

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menyatakan bahwa Mahasiswa:

Nama : ARMA
N I M : 2120203862202015
Prodi : Akuntansi Syariah

Menerangkan bahwa judul skripsi semula:

**PENGARUH AKUNTABILITAS DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP
EFEKTIVITAS ANGGARAN DANA DESA PADA KEC. BINUANG KAB. POLMAN**

Telah diganti dengan judul baru:

**PENGARUH AKUNTABILITAS DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP
EFEKTIVITAS ANGGARAN DESA PADA DESA MIRRING KECAMATAN
BINUANG KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

dengan alasan / dasar:

...Penambahan...nama...desa...dilakukan...untuk...mamparjelas...lokasi...penelitian.
...Agar...lebih...spesifik...dan...tidak...menimbulkan...generalisasi.....

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 21 Juli 2025

Pembimbing Utama

Abdul Hamid, S.E., M.M.

Pembimbing Pendamping




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
*Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 (0421) 21307 (0421) 24404
 PO Box 909 Parepare 9110, website : www.lainpare.ac.id email: mail.lainpare.ac.id*

Nomor : B-1843/ln.39/FEBI.04/PP.00.9/05/2025 16 Mei 2025
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI POLEWALI MANDAR
 Cq. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 di
 KAB. POLEWALI MANDAR

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	:	ARMA
Tempat/Tgl. Lahir	:	TAPPINA, 09 November 2003
NIM	:	2120203862202015
Fakultas / Program Studi	:	Ekonomi dan Bisnis Islam / Akuntansi Syari'ah
Semester	:	VIII (Delapan)
Alamat	:	DUSUN TAPPINA, DESA MIRRING, KECAMATAN BINUANG, KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah BUPATI POLEWALI MANDAR dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

PENGARUH AKUNTABILITAS DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP EFEKTIVITAS ANGGARAN DESA PADA DESA MIRRING KECAMATAN BINUANG KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 19 Mei 2025 sampai dengan tanggal 19 Juni 2025.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

PAREPARE

Dekan,



Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
 NIP 197102082001122002

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jln. Manunggal No.11 Pekkabata Polewali, Kode Pos 91315
 Website: dpmptsp.polmankab.go.id Email: dpmptsp@polmankab.go.id

IIZIN PENELITIAN

NOMOR: 500.16.7.2 /0466/PLID/PMPPTSP/VII/2025

- Dasar :
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 atas perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Bappeda dan Lemba Teknis Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
 - Memperhatikan:
 - Surat permohonan sdr. ARMA
 - Surat rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor: B-0466/Kesbangpol/B.1/410.7/VII/2025, Tgl. 03-06-2025

MEMBERIKAN IIZIN

Kepada:	Nama : ARMA NIM/NIDN/NIP/NPn : 2120203862202015 Asal Perguruan Tinggi : IAIN PAREPARE
	Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM Jurusan : AKUNTANSI SYARI'AH Alamat : TAPPINA KEL. MIRRING KEC. BINUANG KAB. POLEWALI MANDAR

Untuk melakukan penelitian di Desa Miring Kabupaten Polewali Mandar yang dilaksanakan Pada bulan Juni S/D Juli 2025 dengan Proposal berjudul "PENGARUH AKUNTABILITAS DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP EFektifitas ANGGRAN DESA PADA DESA MIRRING KECAMATAN BINUANG KABUPATEN POLEWALI MANDAR"

Adapun izin penelitian ini dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:

- Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, harus melaporkan diri kepada Pemerintah setempat;
- Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
- Mentati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
- Menyerahkan 1 (satu) berkas copy hasil penelitian kepada Bupati Polewali Mandar up.Kepala Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu;
- Surat Izin penelitian akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin penelitian tidak mentati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.
- Izin penelitian ini hanya berlaku 6 bulan sejak diterbitkan.

Demikian izin penelitian ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Polewali Mandar,
 Pada tanggal 3 Juni 2025
 Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,



INENGAH TRI SUMADANA, AP, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda
 NIP : 197605221994121001

Tembusan:
 1.Unsur forkopin di tempat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSxE), Badan Siber dan Sandi Negara



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
KECAMATAN BINUANG
DESA MIRRING

Alamat : Jl. Poros Pinrang Km. 12 Mirring Desa Mirring Kec. Binuang Kab. Polewali Mandar

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : 275 / DM / VI / 2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SARIANTO, A.Md
 Jabatan : Kepala Desa Mirring
 Alamat : Dusun Silopo Desa Mirring Kecamatan Binuang Kab.Polewali Mandar.

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama	: ARMA
Nim	: 212020386220215
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam/Institut Agama Islam Negeri Pare-Pare.

Menerangkan bahwa Mahasiswa yang bersangkutan diatas benar telah selesai melakukan Penelitian di Wilayah Desa Mirring Kecamatan Binuang Kab.Polewali Mandar Terhitung dari tanggal 19 Mei 2025 s/d 19 Juni 2025 dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

PENGARUH AKUNTABILITAS DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP EFEKTIFITAS ANGGARAN DESA, PADA DESA MIRRING KECAMATAN BINUANG KABUPATEN POLEWALI MANDAR.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mirring, 26 Juni 2025



DOKUMENTASI PENELITIAN





BIODATA



Arma, lahir di Tappina pada tanggal 09 November 2023. Merupakan anak kedua dari Bapak M. Saleh dan Ibu Suriyani. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Riwayat pendidikan penulis yaitu mulai masuk taman kanak-kanak di RA Tunas Mulia pada tahun 2007-2009, kemudian melanjutkan pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah (MI) pada tahun 2009-2015, kemudian melanjutkan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Izzatul Ma'arif Tappina pada tahun 2015-2018, kemudian melanjutkan lagi pendidikan ke Madrasah Aliyah (MA) Izzatul Ma'arif Tappina pada tahun 2018-2021. Kemudian pada tahun 2021 penulis melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan mengambil jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Penulis menyusun skripsi ini sebagai tugas akhir mahasiswa, dan untuk memenuhi persyaratan dalam rangka meraih gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun) pada program S1 di IAIN Parepare dengan judul skripsi "***Pengaruh Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat terhadap Efektivitas Anggaran Desa pada Desa Mirring Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar***". Dan juga diharapkan penelitian ini tidak hanya dapat bermanfaat bagi penulis sendiri akan tetapi bermanfaat juga bagi orang lain.

Motto: "Jangan Takut Gagal, Takutlah Jika Tidak Mencoba"

PAREPARE